

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(Studi Kasus di PT BNI (Persero) Tbk)**

Disusun oleh;

ELDY CAHYO LAKSONO

NIM. 125020300111052

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi**



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI
KASUS DI PT BNI TBK)**

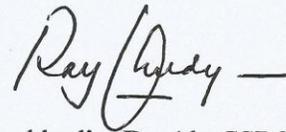
Yang disusun oleh:

Nama : Eldy Cahyo Laksono
NIM : 125020300111052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Malang, 30 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



Roekhudin, Dr., Ak., CSRS., CA

NIP. 19621127 198802 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

(STUDI KASUS DI PT BNI (PERSERO) TBK)”

Disusun oleh:

Nama : Eldy Cahyo Laksono

NIM : 125020300111052

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Syariah

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 26 Juli 2016 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Roekhudin, Dr., Ak., CSRS., CA.

NIP. 19621127 198802 1 001

(Dosen Pembimbing)

2. Endang Mardiaty, Dr., Ak.

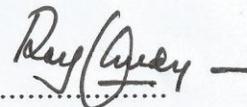
NIP. 19590902 198601 2 001

(Dosen Penguji I)

3. Adri Putra Nugraha, MPA.

NIP. 19791207 200812 1 001

(Dosen Penguji II)



Malang, 11 Agustus 2016

Ketua Jurusan Akuntansi



Nurkholis.,Ph.D.,Ak.,CA.
(NIP. 19660706 199103 1 001)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eldy Cahyo Laksono
NIM : 125020300111052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS DI PT BNI TBK)

Adalah benar – benar hasil saya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan tulisan orang lain yang saya ambil untuk menyalin ataupun meniru dalam bentuk kalimat maupun pendapat dari pemikiran penulis lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan bilamana perlu.

Malang, 30 Juni 2016

Pembuat Pernyataan,



Eldy Cahyo Laksono

NIM. 125020300111052

LEMBAR SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing dari mahasiswa yang beridentitas:

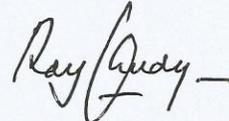
Nama : Eldy Cahyo Laksono
NIM : 125020300111052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Kasus di PT BNI TBK)

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian tentang implementasi CSR BNI yang berdasarkan pada data yang didapat secara *online* berupa laporan keberlanjutan dari tanggal 1 Juni s/d 20 Juni 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



Roekhudin, Dr., Ak., CSRS., CA

NIP. 19621127 198802 1 001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Eldy Cahyo Laksono
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 3 Oktober 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jalan Jatisari Permai 3 / G-26
Alamat Email : eldycl@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2000 – 2006) : SDN Pepelegi 1
SMP (2006 – 2009) : SMPN 4 Surabaya
SMA (2009 – 2012) : SMAN 15 Surabaya
Perguruan Tinggi (2012 – 2016) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya

Pendidikan Non Formal:

- Les Bahasa Inggris LIA (2015)
- Pelatihan Akuntansi Keuangan Syariah IFAS (2013)
- Pelatihan Motivasi diri JPIC FEB UB (2013)

Pengalaman Organisasi:

- Anggota UKM Bumerang Brawijaya (2012 – 2016)
- Anggota divisi MIBB IFAS FEB UB (2012 – 2016)
- Anggota Pedal UB (2013 – 2016)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur kepada Allah SWT peneliti panjatkan atas segala rahmat dan hidayah – Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus di PT BNI (Persero) Tbk)”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan skripsi ini, peneliti tidak luput dari kendala. Kendala ini dapat diatasi peneliti berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Roekhudin, Dr., Ak., CSRS., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Endang Mardiaty, Dr., Ak. selaku Dosen Penguji I (Satu) yang telah memberikan kritik dan masukan untuk perbaikan laporan skripsi ini.
3. Bapak Adri Putra Nugraha, MPA. selaku Dosen Penguji II (Dua) yang telah memberikan kritik dan masukan untuk perbaikan laporan skripsi ini.
4. Bapak Nurkholis., Ph.D., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

5. Bapak Abdul Ghofar., DBA., Ak., CPMA., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
6. Seluruh Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
8. Ayah dan Ibu peneliti yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan peneliti.
9. Teman – teman dan juga sahabat peneliti yang tidak bisa disebutkan satu – satu yang telah memberikan dukungan.
10. Seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan pada pembaca, khususnya rekan – rekan mahasiswa ataupun pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 9 Agustus 2016

Peneliti



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAKSI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kontribusi Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 <i>Corporate Social Responsibility</i>	10
2.1.1 Pengertian CSR	10
2.1.2 Manfaat CSR	16
2.1.3 Motif dalam melaksanakan CSR	18
2.1.4 Tahapan dalam melaksanakan CSR	22
2.1.5 Peraturan Hukum mengenai CSR	22
2.2 Laporan Keberlanjutan	27
2.2.1 Definisi Laporan Keberlanjutan	27
2.2.2 GRI (<i>Global Reporting Initiative</i>).....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Metode Penelitian	30
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data	32
3.3 Instrumen Penelitian	33

3.4 Teknik Analisa Data	33
3.5 Pengujian Kredibilitas Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	37
4.1.1 Sejarah Singkat PT BNI (Persero) Tbk	37
4.1.2 Visi dan Misi PT BNI	43
4.1.3 Lokasi PT BNI	44
4.1.4 Nilai – nilai BNI	44
4.1.5 Prinsip dan Pendekatan Keberlanjutan BNI	48
4.2 <i>Triple Bottom Line</i> BNI	52
4.3 Keterlibatan dengan <i>Stakeholders</i>	56
4.4 <i>Corporate Social Responsibility</i> BNI	59
4.4.1 Program Kemitraan	59
4.4.2 BNI Berbagi	60
4.4.3 BNI <i>Go Green</i>	62
4.4.4 Kampong BNI	64
4.5 Landasan Pelaksanaan CSR	65
4.6 Mekanisme Pelaksanaan CSR BNI	69
4.7 Kebijakan dan Program CSR BNI	70
4.8 Implementasi CSR BNI	72
4.8.1 PROPER sebagai Dasar Pemikiran CSR BNI	73
4.8.2 BNI – Menuju Kemajuan Sumber Daya Manusia	75
4.8.3 BNI – Mencapai Profitabilitas	84
4.8.4 BNI – Menjaga Kelestarian Alam	87
4.9 Pelaporan CSR	90
4.9.1 Bentuk dan Sistematika Pelaporan CSR	92
4.10 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan CSR.....	94
4.11 Permasalahan dan Pemecahannya dalam Pelaksanaan CSR	98
4.12 Evaluasi terhadap Implementasi CSR BNI dari tahun 2010 – 2015...	106
BAB V PENUTUP	112
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran	114
5.3 Keterbatasan Penelitian	115
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal
4.1	Delapan poin Kelompok Pemangku Kepentingan Utama PT BNI Tbk	55
4.2	Program Pelatihan BNI	74
4.3	Penanganan Komplain	76
4.4	Pelatihan untuk Kepatuhan	77
4.5	Program Kredit BNI	84
4.6	Daftar Kegiatan CSR BNI dalam bidang lingkungan alam	86
4.7	Tabel Pengungkapan Standard	92
4.8	Penilaian atas Keberlanjutan BNI	106
4.9	Jumlah item Sustainability Reporting PT BNI	107
4.10	Rata – Rata Pengungkapan Indikator CSR BNI	108

DAFTAR GAMBAR

NO.	Judul Gambar	Hal
4.1	Struktur Bisnis BNI dan Kepemilikan	39
4.2	Pendekatan 4 arah mata angin	49
4.3	<i>Triple Bottom Line</i> BNI	52
4.4	PROPER BNI	73



ABSTRAK**IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY****(Studi Kasus di PT BNI Tbk)****Oleh:****Eldy Cahyo Laksono****Dosen Pembimbing:****Roekhudin, Dr., Ak., CSRS., CA**

PT BNI Tbk adalah sebuah perusahaan Negara yang bergerak di bidang Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi CSR yang sudah dilakukan oleh PT BNI dan menjelaskan apa saja kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh PT BNI. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi laporan CSR perusahaan dan mencari tahu implementasi CSR apa saja yang sudah dilakukan perusahaan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan CSR PT BNI Tbk dari tahun 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi BNI ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu BNI – menuju kemajuan sumber daya manusia, BNI – mencapai profitabilitas, dan BNI – menjaga kelestarian alam. Lalu, kebijakan dan program yang dilakukan BNI berbentuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang memberikan bantuan di berbagai macam bidang yang sudah ditentukan. Program CSR dari BNI dibagi menjadi empat kegiatan besar yaitu Program Kemitraan, BNI Berbagi, BNI *Go Green*, dan Kampoeng BNI. Secara keseluruhan, Program CSR PT BNI sudah berjalan dengan baik dan selalu berdasarkan asas berkelanjutan.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Global Reporting Initiative, Implementasi, Kebijakan, Pelaporan*

ABSTRACT**THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY****(A CASE IN PT BNI TBK)****By:****Eldy Cahyo Laksono****Advisor Lecturer:****Roekhudin, Dr.,Ak.,CSRS.,CA**

PT BNI Tbk is a State – Owned Enterprise engaged in Finance. The purpose of this study is to describe how the implementation of CSR that done by PT BNI and explain what its policies and programs that conducted by PT BNI. This research was carried out by identifying the company's CSR report and find out the implementation of CSR done in accordance with the company if it is desired or not. This study uses data from CSR reporting PT BNI Tbk from 2013-2015. Research Method is Descriptive Qualitative. Results from this study is the implementation of BNI is divided into three sections: BNI – for human resource development, BNI – for profitability achievement, and BNI - natural preservation. Then, policies and programs conducted by BNI create Partnership (the Partnership and Community Development Program), They provide assistance in predetermined areas. The CSR program of BNI is divided into four major activities, it is Partnership, BNI Berbagi, BNI Go Green, and Kampoeng BNI. In general, the CSR program of PT BNI has been running well based on the principle of sustainability.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Global Reporting Initiative, Implementation, Policy, Reporting*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, banyak sekali perusahaan mulai berlomba lomba untuk melakukan program yang namanya *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan salah satu bagian penting dari strategi bisnis perusahaan. Selain sebagai salah satu dari strategi bisnis perusahaan, CSR juga merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang wajib dilakukan untuk melindungi alam sekitar.

Di Indonesia sudah mulai diterapkan program CSR ini namun dalam hal ini sifatnya masih sukarela belum bersifat *mandatory*, dimana hanya perusahaan yang *Go Public* yang menerapkannya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, mulai muncul undang – undang yang mengatur CSR di Indonesia yaitu Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas dimana yang bunyinya “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang- Undang lainnya yang turut memperkuat CSR diberlakukan di Indonesia yaitu Undang – Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007 Pasal 15 dan 34 yang intinya mengatakan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenai sanksi administratif

berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan.(Soewarno,2009)

CSR ini dimaksudkan untuk menekan dunia kerja agar lebih baik lagi dalam menjalankan setiap kegiatan produksinya supaya perusahaan tidak hanya berpikir dalam meraih keuntungan financial sebesar – besarnya namun juga turut serta dalam melestarikan alam sekitar. Sehingga nanti akan tercipta yang namanya *Sustainability* (Berkelanjutan) supaya dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar lagi, tidak hanya pada generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang.

Dengan adanya CSR ini, *stakeholder* memiliki hak untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan atas produk yang digunakannya sehingga mereka menuntut untuk adanya bukti mengenai kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan.Maka dari itu, terciptalah Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*), salah satu bentuk laporan tunggal perusahaan yang isinya berkaitan dengan kinerja perusahaan dalam tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Laporan ini dibuat perusahaan dengan dasar tiga komitmen yaitu meliputi kinerja aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Laporan berkelanjutan mengusung pedoman yang berdasarkan GRI (Global Reporting Initiative) dan berdasar pada konsep *Triple Bottom Lines*, yang dimana meliputi tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.Menurut Elkington,

penting untuk memperhatikan keseimbangan antara 3P yaitu *People, Profit, Planet* yang nantinya harus ditampilkan dalam sebuah pelaporan.

Dengan diterapkannya CSR, banyak sekali manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Perusahaan dapat meminimalisir dampak negatif dari kegiatan produksinya, sehingga tidak merusak alam sekitarnya. Selain itu, dapat menarik minat investor baru melalui laporan berkelanjutan, dimana mereka dapat turut serta dalam kepedulian sosial dan lingkungan. CSR juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan dikenal baik oleh *Stakeholder* yang juga turut berguna untuk mempromosikan perusahaan.

Konsep CSR sendiri melibatkan banyak pihak dari segi tanggung jawab. Bisa melibatkan tanggung jawab antara perusahaan dengan LSM, pemerintah ataupun warga lokal. Hubungan tanggung jawab ini bersifat dinamis, dimana ada hubungan sosial antar *stakeholder* dan akan selalu bersifat dinamis, selalu berkembang, dan tidak dapat dihentikan. Kegiatan CSR bukan hanya diartikan sebagai usaha pelestarian lingkungan saja tapi juga perbaikan tata kelola perusahaan yang baik, penguatan ekonomi masyarakat lokal, dan pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan.

Perusahaan yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bank BNI merupakan bank terkemuka di Indonesia dengan sejarah panjangnya yang membanggakan. BNI terus mencatat berbagai

kemajuan dalam perjalanannya bertransformasi dan bertumbuh. BNI berperan dalam memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan maupun pada pengembang infrastruktur seiringan dengan kemajuan di Indonesia dalam berbagai bidang seperti perdagangan dan industri.

Sebagai BUMN, BNI tunduk kepada berbagai peraturan khusus tentang BUMN salah satunya Undang-Undang No 19/2007 dan Keputusan Menteri BUMN No. SE-433/2003, untuk melibatkan masyarakat dengan target pembiayaan tertentu, yaitu antara 1% - 4% dari pendapatan bersih. Program CSR BNI sendiri merupakan perwujudan dari komitmen bank yang kuat untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, bagaimana kebijakan dan program yang dilaksanakan, dan apa saja permasalahan yang dihadapi PT BNI (Persero) Tbk, melalui penelitian ini dengan judul: **“Implementasi *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus di PT BNI (Persero) Tbk)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengimplementasian CSR di PT BNI (Persero) Tbk?

2. Bagaimana kebijakan dan program yang dilaksanakan di PT BNI (Persero) Tbk?
3. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR di PT BNI (Persero) Tbk?
4. Bagaimana pemecahan masalah dalam pelaksanaan CSR di PT BNI (Persero) Tbk?

1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan dibahas, maka yang akan diabatasi pada penelitian pada hal ini:

1. Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) yang digunakan adalah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang berasal dari *website* resmi BNI
2. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang digunakan adalah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang berasal dari *website* resmi BNI
3. Standar yang digunakan adalah GRI (*Global Reporting Initiative*)

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi CSR yang sudah dilakukan oleh PT BNI (Persero) Tbk.

2. Untuk menjelaskan kebijakan dan program apa saja yang telah dilakukan PT BNI (Persero) Tbk.
3. Untuk menganalisis masalah apa saja yang dihadapi oleh PT BNI (Persero) Tbk dalam pelaksanaan CSR.
4. Untuk menganalisis pemecahan masalah dalam pelaksanaan CSR di PT BNI (Persero) Tbk.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian. Hal ini karena dijadikan sebagai parameter dalam penilaian penelitian. Terdapat dua aspek kontribusi dalam penelitian ini, yaitu: Kontribusi akademik dan Kontribusi praktis.

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih luas mengenai manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT BNI Tbk.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dari aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan, yaitu disini adalah PT BNI. Pertama, untuk menjadi referensi pihak manajemen PT BNI mengenai penerapan program CSR yang telah diterapkan selama ini, sehingga pihak manajemen dapat menentukan program CSR yang cocok dengan keadaan sekitar. Lalu, program CSR ini diharapkan dapat

meningkatkan citra positif perusahaan serta diharapkan program CSR ini dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga mampu memperbaiki dan memberi kenyamanan terhadap masyarakat luas.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah selaku regulator perusahaan BUMN untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk memberikan inspirasi dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis lainnya
- b. Untuk menambah bekal dan wawasan mengenai penerapan CSR di Indonesia
- c. Untuk memotivasi diri sendiri untuk turut serta dalam pengembangan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dalam hal penerapan CSR

2. Bagi Perusahaan

- a. Untuk membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi melalui solusi yang disampaikan penulis
- b. Untuk sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat terutama mahasiswa

- c. Untuk lebih memahami penerapan CSR di Indonesia sehingga perusahaan dapat menerapkan praktik – praktik dalam kegiatan operasionalnya sesuai standar CSR yang ada di Indonesia
 - d. Sebagai perbandingan dalam menata, mengorganisir, dan menerapkan program CSR – nya
3. Bagi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya
 - a. Untuk memberikan referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya
 - b. Untuk menambah koleksi data mengenai penerapan CSR di Indonesia

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam Skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisikan subbab - subbab antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini kan dijelaskan tentang tentang teori – teori yang berhubungan dan juga menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama, akan menyangkut standar melakukan CSR yang digunakan

perusahaan yaitu GRI. Yang kedua, alasan perusahaan untuk melakukan CSR. Dan yang terakhir mencakup landasan teori mengenai CSR dan karakteristik perusahaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil dan menelaah data – data yang telah ditemukan. Bab ini akan membahas profil dari perusahaan, struktur perusahaan, program CSR yang dilakukan, dan bentuk dari laporan keberlanjutan yang sudah beredar di masyarakat.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan tentang saran dan kesimpulan dari hasil penelitian ini serta batasan masalah yang dihadapi. Dan juga solusi yang diberikan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Corporate Social Responsibility*

CSR yang juga dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan yang antara lain yaitu: pegawai, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat lainnya. CSR bagi perusahaan adalah suatu mekanisme untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 3 aspek yaitu Lingkungan, Sosial, dan Profit dalam kegiatan operasinya.

2.1.1 Pengertian CSR

Terdapat banyak definisi mengenai CSR. Nor Hadi (2011) menjelaskan bahwa CSR berkembang sejalan interrelasi antara perusahaan dan masyarakat yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Menurut Lingkar Studi CSR Indonesia, adalah upaya sungguh – sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Secara singkat, maksudnya adalah untuk mengajak perusahaan di

Indonesia untuk bersungguh – sungguh dalam melakukan CSR agar dapat memberikan manfaat tidak ke perusahaan saja melainkan ke masyarakat dan lingkungan dan berusaha meminimalkan dampak negatif dari kegiatan produksinya guna melestarikan lingkungan yang akan digunakan oleh generasi mendatang.

Ada beberapa definisi CSR yang dijelaskan oleh berbagai organisasi internasional sebagai berikut ini:

1. *World Business Council for Sustainable Development*: Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, guna meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.
2. *Canadian Government*: Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.
3. *International Finance Corporation*: Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara yang baik bagi bisnis dan pembangunan berkelanjutan.

4. *European Commission*: Sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip sukarela
5. *Institute of Chartered Accountants, England and Wales*: Jaminan bahwa organisasi – organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, guna memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan.

Di pihak lain, *Prince of Wales International Business Forum* menyatakan bahwa CSR meliputi lima pilar:

1. *Building Human*: Mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal baik dari sisi internal maupun eksternal. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perusahaan melakukan pemberdayaan melalui *community development*.
2. *Strengthening economies*: Pilar ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi komunitas.
3. *Assessing social cohesion*: Perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
4. *Encouraging good governance*: Pilar ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik.

5. *Protecting the environment*: perusahaan harus dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan ISO 26000 tahun 2007, *Guidance on Social Responsibility* (Waryanto, 2010), CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari organisasi untuk dampak – dampak dari keputusan – keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dari masyarakat, pertimbangan harapan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dari norma – norma internasional yang konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi secara menyeluruh.

Menurut Kotler, CSR dikatakan sebagai *discretionary* yang dalam arti luas berarti sesuatu yang perlu dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, akan berakibat merugikan diri sendiri. Menurut Branco dan Roriguez (2007) menjelaskan CSR dari sudut pandang pemangku kepentingan, menyatakan bahwa CSR yang didasarkan pada teori pemangku kepentingan, berkeyakinan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena pengaruh dari tindakannya. Ini berarti perusahaan harus senantiasa peka pada kerusakan potensial dari tindakannya terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan, serta dalam aktivitas sosialnya bisnis harus menggunakan segala sumber dayanya untuk kepentingan publik.

Menurut Suhandri M. (2007), CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR diartikan sebagai kepedulian perusahaan untuk membawa keseimbangan pada 3 aspek tersebut.

Menurut Falck dan Heblich (2007) bahwa CSR diungkapkan sebagai komitmen perusahaan yang bersifat sukarela untuk melebihi kewajiban eksplisit dan implisit yang dikenakan pada perusahaan dengan harapan masyarakat dari perilaku perusahaan konvensional. CSR diartikan sebagai kewajiban perusahaan secara sukarela untuk memberikan kepedulian lingkungan sosial dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Dalam model yang telah diusulkan oleh Carrol (1979, 1991), definisi dari CSR harus terdiri dari 3 aspek diartikulasikan dan saling terkait:

1. Definisi dasar dari total tanggung jawab sosial perusahaan
2. Penghitungan isu – isu pada setiap poin tanggung jawab sosial
3. Spesifikasi dari filosofi respon perusahaan terhadap *social responsiveness*

Menurut Carroll (1979, 1991) dalam pandangan perspektif yang lain, CSR dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Economic responsibilities*, merupakan tanggung jawab yang paling penting di dalam bisnis perusahaan, karena mempunyai tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Disini perusahaan bertanggung jawab kepada para pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba.
2. *Legal responsibilities*, adalah tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk terciptanya aktivitas bisnis yang taat hukum dan bersih
3. *Ethical responsibilities*, adalah meskipun tidak ada dasar hukum yang mengikat, komponen CSR ini diturunkan dari norma sosial dan moral yang ada di masyarakat sehingga perusahaan sepatasnya memberikan suatu bentuk tanggung jawab sosial pada pemangku kepentingan (stakeholder).
4. *Responsibilities discretionary*, adalah tanggung jawab yang dilakukan perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan perbaikan kualitas hidup yang berlandaskan rasa sukarela dan bukan karena alasan hukum yang mengikat.

2.1.2 Manfaat CSR

CSR dapat memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi masyarakat melainkan juga untuk perusahaan. Wibisono (2007) menjelaskan bahwa manfaat – manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan CSR, antara lain:

1. Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra positif dari masyarakat. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal – hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah dalam pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).
2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah. Adanya perusahaan di suatu daerah akan menyerap sejumlah tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak – haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat, praktik CSR akan lebih menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat dalam memperhatikan lingkungannya.
4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut *corporate misconduct* atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu,

negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar atau bisa dikatakan tidak digelapkan perusahaan.

2.1.3 Motif dalam melaksanakan CSR

Ada beberapa motif yang dijelaskan oleh Mulyadi (2003), antara lain:

1. Motif keamanan: Program CSR dilakukan setelah ada tuntutan masyarakat yang biasanya diwujudkan melalui demonstrasi. Program tidak dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Kecenderungannya program dilakukan ketika kebebasan masyarakat sipil semakin besar pasca desentralisasi.
2. Motif memenuhi kewajiban kontraktual : Pertanggungjawaban program CSR kepada pemerintah daerah dan pusat. Propaganda kegiatan CSR melalui media massa
3. Komitmen moral: Wacana CSR dan propaganda kegiatan CSR melakukan media massa

Pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Wibisono (2007) bahwa sulit untuk menentukan benefit perusahaan yang menerapkan CSR, karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa bila

perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik akan mendapat kepastian benefitnya. Maka dari itu, berikut motif dilaksanakannya CSR:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan. Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah yang menjadi modal *non-financial* utama bagi perusahaan dan bagi *stakeholder*-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.
2. Layak mendapatkan *social licence to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keeluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka disamping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga harus

mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR.

4. Melebarkan akses sumber daya. *Track record* yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses *recycle* atau daur ulang kedalam siklus produksi.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya *trust* kepada perusahaan.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi

penanggungjawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.
10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak *reward* ditawarkan bagi penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kesempatan yang cukup tinggi.

Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan CSR dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin yang diberikan pemerintah, dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

2.1.4 Tahapan dalam melaksanakan CSR

CSR tidak langsung dilaksanakan begitu saja namun ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Menurut Hurairah (2008), terdapat enam tahapan dalam melaksanakan CSR, yaitu: *assessment, plan of treatment, treatment action,*

monitoring and evaluation, termination dan *after care*. Namun dalam tiga tahapan awal sudah cukup mewakili CSR dalam jangka pendek (kurang dari 10 tahun), yaitu:

1. *Assessment*: Proses mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*ekspresed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Dalam proses ini masyarakat dilibatkan agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar keluar dari pandangan mereka sendiri.
2. *Plant of Treatment*: Merupakan rencana tindakan yang dirumuskan seharusnya, berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan penanganan-penanganan masalah yang dirasakan masyarakat. Wacana mengenai program-program berbasis masyarakat mendorong berkembangnya metodologi perencanaan dari bawah.
3. *Treatment action*: Tahap pelaksanaan merupakan tahap paling krusial dalam pelaksanaan CSR. Sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat menyimpang dalam pelaksanaannya dilapangan jika tidak terdapat kerjasama antara masyarakat, fasilitator dan antar warga.

2.1.5 Peraturan hukum mengenai CSR

Aturan hukum diberlakukan mengenai pelaksanaan CSR guna memperkuat sifat CSR di Indonesia yang masih bisa dikatakan *voluntary* namun dengan beberapa peraturan dibawah ini bisa mengubah CSR di Indonesia menjadi *mandatory*, yaitu:

1. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneq BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah:

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3. Bantuan peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;

5. Bantuan sarana ibadah;
 6. Bantuan Pelestarian Alam.
2. Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74
- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
 - Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

4. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p). Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan. Dengan adanya Undang – undang ini menjamin masyarakat tidak dirugikan dengan kegiatan operasional perusahaan.

5. *Guidance* ISO 26000

Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9001: 2000 dan 14001: 2004. ISO 26000 hanya sekedar standar dan panduan, tidak menggunakan mekanisme sertifikasi. Terminologi *Should* didalam batang tubuh standar berarti *shall* dan tidak menggunakan kata *must* maupun *have to*. Sehingga Fungsi ISO 26000 hanya sebagai *guidance*.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

2.2 Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan merupakan laporan yang diterbitkan oleh perusahaan terkait kegiatan operasionalnya yang dimana mengungkapkan segala kinerjanya terkait aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuan dibuat laporan ini untuk mengkomunikasikan komitmen perusahaan dan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

2.2.1 Definisi Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan adalah pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan atas usaha yang berkelanjutan kepada para *stakeholder* baik internal atau eksternal. Laporan keberlanjutan merupakan istilah umum untuk menggambarkan laporan mengenai *triple bottom line* yang dimana sebuah laporan yang meliputi tiga aspek yaitu *people* (sosial), *planet* (lingkungan), *profit* (ekonomi).

Definisi laporan keberlanjutan menurut Ramanathan (1976) dan Arief Suadi (1988) adalah suatu proses pemilihan variabel-variabel yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Jadi, laporan keberlanjutan merupakan alat untuk menilai kinerja perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.

Parker (1986) mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai proses pengukuran, pengaturan dan pengungkapan dampak pertukaran antara perusahaan dengan lingkungannya. Laporan keberlanjutan disini berarti merupakan proses yang diberikan perusahaan kepada lingkungan dan dampak apa yang akan diperoleh oleh kedua pihak ini apakah menguntungkan atau tidak.

Menurut Hadibroto (1988) dan Bambang Sudibyo (1988), dalam Arief Suadi (1988) sebagai akuntansi yang memerlukan laporan mengenai terlaksananya pertanggungjawaban sosial perusahaan. Dalam definisi ini, laporan keberlanjutan adalah suatu laporan yang berisikan tentang kegiatan – kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan sosial.

2.2.2 GRI (*Global Reporting Initiative*)

GRI adalah sebuah organisasi internasional yang independen yang mana memiliki tugas membantu bisnis, pemerintah dan organisasi lainnya untuk memahami dan memberi informasi tentang dampak dari bisnis sendiri terhadap isu keberlanjutan

seperti perubahan iklim lingkungan, hak manusia, dan hal lainnya. GRI didirikan di Boston pada tahun 1997 dan saat ini berpusat di Amsterdam.

GRI dibentuk dengan tujuan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk membuat laporan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. GRI membuat yang namanya *GRI Guidelines*. *GRI Guidelines* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: *Reporting principles and Standards Disclosures* dan *Implementation Manual*. Yang pertama *Reporting principles and Standards Disclosures* berisikan tentang Prinsip Pelaporan, Standar pengungkapan, dan kriteria untuk diterapkan oleh suatu organisasi untuk menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman. Lalu yang kedua, *Implementation Manual* berisikan tentang penjelasan bagaimana menerapkan prinsip pelaporan, bagaimana mempersiapkan informasi yang akan diungkapkan dan bagaimana menafsirkan berbagai konsep kedalam pedoman.

Pedoman GRI berlaku untuk internasional dan sudah diterapkan oleh kebanyakan organisasi. Sudah lebih dari 1500 organisasi dari 60 negara menggunakan GRI untuk menghasilkan laporan keberlanjutan. Pedoman GRI sendiri berlaku untuk perusahaan swasta, lembaga publik, perusahaan kecil, perusahaan industri, LSM, dan sebagainya. GRI sudah dipercaya sebagai suatu standar dalam pembuatan laporan keberlanjutan yang sudah disusun dengan sangat baik.

Adapun indikator GRI dibagi menjadi tiga bagian yaitu Indikator Kinerja Ekonomi, Indikator Kerja Lingkungan, dan Indikator Kinerja Sosial:

1. Indikator Kinerja Ekonomi meliputi aspek: Kinerja Ekonomi, Keadaan pasar saat ini, Dampak ekonomi tidak langsung, dan Praktik Pengadaan
2. Indikator Kinerja Lingkungan meliputi aspek: Material, Energi, Air, Keberagaman Biotik, Emisi, Sampah (Limbah), Produk dan jasa, Transportasi, Penilaian lingkungan, dan Mekanisme pengaduan lingkungan
3. Indikator Kinerja Sosial meliputi aspek: Tenaga kerja, HAM (Hak Asasi Manusia), Sosial, dan Tanggung jawab produk

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Mcmillan dan Schumacher (2003), pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Penelitian kualitatif tidak berisikan angka – angka dan data statistik. Namun, berisikan tentang teori dan opini yang memperkuat penelitian ini. Menurut Strauss dan Corbin (2003), penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian deskriptif menurut Hidayat Syah (2010), adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas – luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Sukmadinata (2006) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun

fenomena buatan. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antar fenomena lainnya.

Penelitian ini diadakan dan dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai praktik pelaporan CSR di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti menggunakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yaitu Bank BNI. Penelitian ini berdasarkan kepada literatur teori yang sudah ada dan dokumen yang sudah diperoleh berupa Laporan Keuangan Tahunan (*annual report*) dan Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Maka dari itu, peneliti mencoba menggambarkan mengenai praktik CSR pada PT BNI (Persero) Tbk pada tahun 2013 – 2015 yang tertuang dalam *Annual report* dan *Sustainability Report*.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti media cetak, internet, televisi, dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan berasal dari laporan historis perusahaan yang telah dipublikasikan yang tertuang dalam *Annual report* dan *Sustainability Report*. Tahun dari data yang diambil adalah dari tahun 2013 -2015 karena cukup mewakili keadaan saat ini. Data ini sendiri didapat dari *website* BNI (<http://www.bni.co.id/id-id/hubinvestor/kinerjakeuangan/laporankeberlanjutan.aspx>).

Teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Analisis dokumen

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dimana informasi dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen biasanya digunakan sebagai bukti terhadap informasi yang telah terjadi di masa silam. Menurut Benny (2011), studi dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian.

Dokumen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Annual report* dan *Sustainability Report* PT BNI Tbk dari tahun 2013 – 2015.

2. Analisis isi

Teknik pengumpulan data dimana data yang didapat berupa teks tertulis yang bisa berupa jurnal, tesis, laporan, buku, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan dan dibutuhkan pembahasan yang mendalam. Contoh data yang diperoleh dari metode ini bisa berupa gambaran umum perusahaan dan visi misi perusahaan.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa serta menyajikan data – data secara sistematis dan obyektif dengan tujuan memecahkan suatu masalah.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dalam hal ini laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan bagian penting dalam penelitian karena membedakan penelitian sejenis dengan penelitian lainnya. Menurut Moleong (2002), bahwa analisa data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yang menggambarkan data yang diperoleh guna menghasilkan suatu kesimpulan. Berikut langkah – langkah dalam melakukan analisa data:

1. Mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini telah diperoleh data Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan tahun 2013 – 2015
2. Melakukan analisis awal dengan menggambarkan bagaimana profil perusahaan, visi misi, dan tujuan perusahaan.
3. Menyiapkan tabel kerja yang akan digunakan sebagai alat untuk penelitian. Tabel kerja ini akan disesuaikan dengan indikator – indikator GRI yang berlaku.
4. Menganalisis dan membandingkan apakah kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan sudah tertera dalam indikator GRI yang terdapat dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
5. Melakukan analisis terhadap isi dari laporan keberlanjutan dan laporan keuangan tahunan yang sudah diterbitkan perusahaan. Dalam hal ini laporan dari tahun 2013 - 2015. Dan ini untuk menemukan apa saja program yang sudah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan tersebut. Bila masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek akan dilampirkan dalam tabel kerja.

6. Memberikan masukan terhadap hasil analisis data dan menjelaskan juga apa saja faktor yang mempengaruhi suatu aspek untuk dilaporkan atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan indikator GRI.
7. Memberi kesimpulan akhir berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini.

3.5 Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data dilakukan untuk memperkuat data yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014), ada lima macam pengujian kredibilitas data yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti.

2. Meningkatkan ketekunan

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh.

3. Triangulasi

Merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik dengan informasi dari data yang sudah terkumpul guna melakukan pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada

4. Analisis Kasus Negatif

Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tak ada lagi data yang berbeda dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Dibutuhkannya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Untuk penelitian ini, dilengkapi dengan foto – foto dokumentasi sehingga lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *membercheck*

Adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh si pemberi data.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT BNI adalah sebuah institusi yang bergerak dalam bidang perbankan milik pemerintah. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Dalam struktur organisasinya, BNI saat ini dijabat oleh Achmad Baiquni. BNI sendiri saat ini sudah mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 cabang di luar negeri. BNI termasuk dalam BUMN dalam perbankan terbesar ketiga di Indonesia.

4.1.1 Sejarah Singkat PT BNI (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1946. BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia yang baru merdeka, sebelum akhirnya berstatus sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia.

Menyusul penunjukan *De Javasche Bank* yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran BNI sebagai bank sentral. BNI lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan

diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor Cabang BNI pertama di luar negeri dibuka di Singapura pada tahun 1955.

Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah, dan Bank Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti di Kepulauan Riau atau daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan. BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah dimana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak – anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak – anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas

Sumatera Utara (USU) di Medan. Saat ini BNI telah memiliki kantor layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia.

Dalam masa perjalanannya, BNI telah mereposisi identitas korporatnya untuk menyesuaikan dengan pasar keuangan yang dinamis. Identitas pertama BNI sejak BNI berdiri berupa lingkaran warna merah dengan tulisan BNI 1946 berwarna emas melambangkan persatuan, keberanian, dan patriotisme yang memang merefleksikan semangat BNI sebagai bank perjuangan. Pada tahun 1988, identitas korporat berubah menjadi logo layar kapal dan gelombang untuk merepresentasikan posisi BNI sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang siap memasuki pasar keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar negeri. Gelombang mencerminkan gerak maju BNI yang dinamis sebagai bank komersial Negara yang berorientasi pada pasar.

BNI melakukan proses restrukturisasi termasuk diantaranya melakukan *rebranding* untuk membangun dan memperkuat reputasi BNI. Identitas baru ini dengan menempatkan angka “46” di depan kata BNI. Kata “BNI” berwarna *tosca* yang mencerminkan kekuatan, keunikan, dan kekokohan. Sementara angka “46” dalam kotak berwarna *orange* diletakkan secara diagonal untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

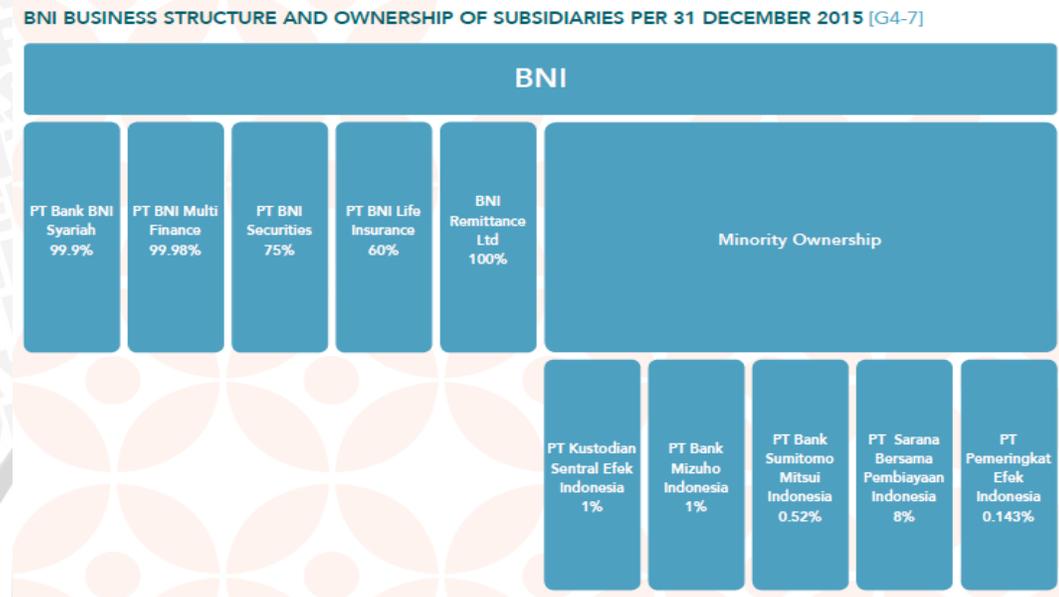
Pada tahun 1996, BNI menjadi bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 25% sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang disebut BEI (Bursa Efek Indonesia)).

Pada tahun 2000, Pemerintah melakukan proses rekapitalisasi BNI. Selanjutnya, pada tahun 2007 dan 2010, BNI melakukan *right issue* untuk memperkuat *spin – off* Unit Usaha Syariah ke anak perusahaan PT BNI Syariah.

Per 31 Desember 2010, Pemerintah RI memegang 60% saham BNI, sementara 40% saham selebihnya dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing. Dengan kantor pusat yang berkedudukan di Wisma BNI 46, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat dan dengan total aktiva senilai Rp 248, 6 Triliun pada akhir tahun 2010, BNI adalah bank terbesar ke- 4 di Indonesia saat ini berdasarkan jumlah aktiva, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI melayani nasabah korporasi, komersial, dan individu dengan beragam produk dan jasa perbankan yang didistribusikan melalui jaringan pelayanan yang luas mencakup 1.148 *outlet* domestik dan 5 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura, lebih dari 5.004 unit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik sendiri, serta fasilitas *Internet banking* dan *Mobile banking* yang memberikan kemudahan akses bagi nasabah.

Pada tahun 2015, BNI tidak melakukan *right issue*. Melainkan, BNI membayar sejumlah dividen kas yang berjumlah mencapai Rp 2, 69 triliun, atau 25% dari total laba bersih pada tahun 2014. BNI memiliki struktur bisnis yang mudah dipahami oleh para *stakeholders*. Berikut ini adalah gambar yang berisikan kepemilikan anak perusahaan dari PT BNI Tbk dan struktur bisnisnya pada tahun 2015 yaitu:

Gambar 4.1: Struktur Bisnis BNI dan Kepemilikan Anak Perusahaan



(Sumber: PT BNI (Persero) Tbk tahun 2015)

BNI memiliki struktur bisnis perusahaan yang mudah untuk dibaca dan dipahami oleh para *stakeholders*. Di tahun 2015, BNI memiliki 10 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan pembiayaan dengan tujuan yang berbeda. Dimana salah satunya bergerak di bidang syariah sedangkan yang lain bergerak di bidang khususnya. Ini merupakan salah satu tujuan BNI untuk memperluas bidang ke segala arah sesuai dengan motonya “**Pembangunan ke segala arah**”. Lalu berikut adalah penjelasan mengenai gambar 4.1 yaitu:

- PT BNI Tbk memiliki kepemilikan saham sebesar 99,9% terhadap perusahaan PT BNI Syariah. Kepemilikan saham sebesar 0,01% diberikan kepada karyawan sebagai bentuk *reward*.

- PT BNI Tbk memiliki kepemilikan saham sebesar 99,98% terhadap perusahaan PT BNI Multi Finance. Kepemilikan saham sebesar 0,02 % diberikan kepada karyawan sebagai bentuk *reward*.
- PT BNI Tbk memiliki kepemilikan saham sebesar 75% terhadap perusahaan PT BNI Securities. Kepemilikan saham sebesar 25 % diberikan kepada para *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, pemegang saham, masyarakat, dan pihak – pihak lainnya.
- PT BNI Tbk memiliki kepemilikan saham sebesar 60% terhadap perusahaan PT BNI Life Insurance. Kepemilikan saham sebesar 40 % diberikan kepada para *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, pemegang saham, masyarakat, dan pihak – pihak lainnya.
- PT BNI Tbk memiliki kepemilikan saham sebesar 100 % terhadap perusahaan PT BNI Remittance. Seluruh kepemilikan saham berada di tangan PT BNI Tbk tanpa adanya pemegang saham lainnya.

Lalu berikut adalah kepemilikan minoritas dari PT BNI Tbk atau bisa dikatakan BNI hanya memiliki bagian kecil dari kepemilikan saham yaitu dibawah 10 %. Berikut adalah perusahaan yang termasuk dalam bagian minoritas yang dimiliki oleh bank BNI yaitu:

- PT BNI Tbk hanya memiliki kepemilikan saham sebesar 1 % terhadap perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- PT BNI Tbk hanya memiliki kepemilikan saham sebesar 1% terhadap perusahaan PT Bank Mizuho Indonesia.
- PT BNI Tbk hanya memiliki kepemilikan saham sebesar 0,52% terhadap perusahaan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
- PT BNI Tbk hanya memiliki kepemilikan saham sebesar 8% terhadap perusahaan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia.
- PT BNI Tbk hanya memiliki kepemilikan saham sebesar 0,143% terhadap perusahaan PT Pemeringkat Efek Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi PT BNI

Berikut adalah visi dan misi dari PT BNI (Persero) Tbk:

Visi:

- Menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja

Misi:

- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (*the bank of choice*)
- Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor

- Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial
- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik

4.1.3 Lokasi PT BNI Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, PO BOX 2955 JKT.Telepon.(62-21) 251 1946, 572 8387.Fax.(62-21) 572 8805. Email: investor.relations@bni.co.id. Dengan letak yang sangat strategis ini menguntungkan bagi banyak pihak bagi bisnis BNI sendiri, pengusaha, pebisnis, dan mitra usaha lainnya.

4.1.4 Nilai – nilai BNI

BNI memiliki nilai – nilai yang dianut dalam setiap kegiatannya. BNI membagi nilai ini menjadi 2 kategori yaitu nilai budaya kerja dan nilai perilaku utama. Berikut ini adalah penjelasannya, yaitu:

4 Nilai budaya Kerja BNI

- Profesionalisme
BNI sendiri menjunjung tinggi profesionalisme dalam setiap pekerjaannya. Profesional berarti menjalankan usahanya sesuai dengan

protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima gaji sesuai dengan usaha yang dilakukannya.

- Integritas

Adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan – tindakan, nilai – nilai, metode – metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. BNI memiliki integritas tinggi yang berarti memiliki ciri – ciri dan pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. BNI selalu konsisten dan teguh atas pendiriannya sehingga bisa dikatakan BNI berintegritas.

- Orientasi Pelanggan

Berarti bahwa BNI selalu mengutamakan kepuasan dari pelanggan/nasabahnya dan selalu menomorsatukan mereka diatas hal lainnya. Ini semua dengan tujuan meningkatkan nama baik dan citra perusahaan di masyarakat. Dengan berorientasi kepada pelanggan, maka pelanggan/nasabah akan merespon hasil kerja BNI dengan positif. Sehingga kemajuan BNI dalam pembangunan ke segala arah akan berjalan dengan baik.

- Perbaikan Tiada Henti

Berarti BNI selalu mengupayakan hal terbaik untuk semuanya. Semua disini termasuk masyarakat, pemerintah, *shareholders*, dan para pemangku kepentingan lainnya. BNI selalu siap menerima kritik dan

saran dari para pengguna produknya. Hal itu demi memperbaiki kekurangan dari BNI dan terus berupaya menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Perbaikan ini teruslah berlanjut dan tidak terputus di satu bidang saja tapi banyak bidang, sesuai dengan moto dari BNI yaitu **“Pembangunan Segala Arah”**

6 Nilai Perilaku Utama Insan BNI

- Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik

BNI selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya supaya lebih baik lagi dan selalu berusaha untuk memberikan hasil terbaik bagi nasabahnya. Hal ini semua demi mendapat kepercayaan dari para nasabahnya.

- Jujur, tulus, dan ikhlas

BNI selalu mengutamakan jujur diatas segalanya. BNI akan memberikan sanksi yang tegas bagi para karyawannya bila ada yang tidak jujur. BNI juga selalu tulus dan ikhlas dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya. Tidak peduli permintaan sesulit apapun pasti akan dilakukan BNI bila memang dirasa mampu dilakukan.

- Disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab

BNI mengutamakan karyawannya memiliki sikap disiplin, kosisten, dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan. Oleh karena

itu, BNI membuat kebijakan seperti *reward and punishment* supaya karyawannya lebih antusias lagi dalam bekerja dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaannya.

- Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis

BNI selalu berusaha membangun hubungan yang baik dengan para mitra kerjanya. BNI berusaha memberikan layanan yang terbaik dengan membangun mitra kerja yang dapat memberikan keuntungan secara mutualisme, dimana kedua pihak saling menguntungkan.

- Senantiasa melakukan penyempurnaan

BNI tidak pernah berhenti dalam melakukan penyempurnaan dalam segala bidang. BNI selalu mengharapkan kritik dan saran dari para nasabahnya untuk melakukan penyempurnaan pada bidang yang dikiranya belum berjalan dengan sempurna. Apabila sempurna dalam segala bidang, maka BNI yakin bahwa akan dapat meningkatkan jumlah nasabahnya sesuai dengan hail jerih payah mereka.

- Kreatif dan inovatif

BNI selalu membuat produk – produk bank yang sangat menjanjikan. BNI ingin membuat terobosan baru dimana produk banknya dapat dinikmati oleh segala pihak tanpa adanya keluhan. BNI selalu mengajarkan karyawannya untuk selalu kreatif dan inovatif dengan cara mendengarkan ide – ide yang mereka sampaikan dalam rapat

besar. Mereka tidak membatasi kreativitas dari para karyawannya sehingga nantinya bisa timbul produk produk baru yang inovatif yang bisa menambah citra perusahaan.

4.1.5 Prinsip dan Pendekatan Keberlanjutan BNI

BNI memiliki 7 prinsip dasar yang dijadikan dasar untuk membuat laporan keberlanjutannya. Hal ini berdasarkan oleh teori oleh Alan Atkisson antara lain:

1. Berfikir untuk jangka panjang

BNI selalu berfikir bagaimana keberlanjutan usahanya di masa yang akan datang. Maka dari itu, BNI selalu menyusun rencana jangka panjang dalam waktu 10 – 25 tahun dan apa yang akan mereka lakukan dalam jangka waktu tersebut. BNI juga selalu mengutamakan tindakan atau hasil usahanya tidak merugikan lingkungan sekitarnya sehingga keberlangsungan perusahaan akan semakin baik.

2. Pahami sistemnya

BNI selalu berusaha memahami apa yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternalnya. Dalam lingkungan internal, BNI selalu berusaha memahami karyawan – karyawannya dan sistem yang dianut apakah sudah berjalan dengan baik. Lalu, untuk eksternal, BNI juga berusaha memahami apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang akan dilakukan BNI untuk bisa memenuhi ekspektasi.

3. Kenali batasanmu

BNI dalam melakukan tindakan selalu sadar bahwa akan ada batasan – batasan yang bakal tidak bisa dilakukan. Maka dari itu, BNI menerima kritik dan saran dari para pemangku kepentingan/ *stakeholders*. Dan apabila dirasa tidak bisa dilakukan, maka BNI akan berusaha menjelaskan kepada para pemangku kepentingan dan meminta maaf atas hasil kerjanya.

4. Melindungi alam

BNI berusaha melindungi alam dengan tidak merusaknya dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan berusaha menjaga kelestarian alam dengan tidak merusaknya dan melakukan program – program penyelamatan lingkungan yang dilakukan dengan tujuan keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang. BNI juga sangat memperhatikan kenyamanan dan kebersihan lingkungan yang nantinya berdampak langsung pada masyarakat sekitar.

5. Transformasi bisnis

Adalah seluruh proses perubahan yang dilakukan BNI untuk memosisikan diri agar lebih baik dalam menyikapi dan menjawab tantangan – tantangan bisnis baru, lingkungan usaha yang berubah secara cepat maupun keinginan – keinginan baru yang muncul dalam perusahaan. Contohnya adalah BNI sudah menghapus pencetakan kertas mesin ATM guna menyelamatkan lingkungan dengan melakukan penghematan kertas.

6. Praktik keadilan

BNI selalu menindak tegas karyawannya yang melakukan kesalahan. BNI tidak pandang bulu dalam melakukan keadilan. Apabila dirasa salah, maka akan diberikan sanksi yang sesuai atas usaha yang dilakukan. BNI selalu menjunjung tinggi keadilan dalam karyawannya. Contohnya adalah memberi sanksi hukum kepada karyawan yang menagalami tindak korupsi.

7. Menjunjung tinggi kreativitas

BNI selalu menjunjung tinggi kreativitas pada karyawannya. Bagi BNI, kreativitas adalah metode untuk mencapai tujuan perusahaan, kreativitas adalah sebuah gagasan yang nantinya akan mengilhami munculnya gagasan yang lain. Maka dari itu segala jenis upaya untuk mengembangkan kreativitas, akan selalu didukung oleh BNI.

Lalu berikut ini adalah pendekatan 4 arah mata angin oleh Atkisson yang dijadikan dasar sebagai pembuatan laporan keberlanjutannya. Menurut Atkisson, 4 arah mata angin ini paling cocok untuk digunakan dalam pembuatan dasar laporan keuangan karena memang 4 hal yang ditunjukkan memang mewakili keberlanjutan dari Bank BNI.

Berikut ini adalah gambar 4.2 yang menunjukkan 4 arah pendekatan mata angin yang dibuat oleh Atkisson yaitu:

Gambar 4.2: Pendekatan 4 arah mata angin



(Sumber: PT BNI (Persero) Tbk)

Gambar diatas merupakan alat untuk membagi aspek keberlanjutan yang dikembangkan oleh Alan Atkisson yang disebut *Compass*. Kompas terdiri dari empat penjuror yaitu *North*, *South*, *East*, dan *West*. Lalu untuk lebih mudah diingat, Alan Atkisson memodifikasinya menjadi N = *Nature* (Lingkungan Hidup); S = *Society* (Masyarakat); E = *Economy* (Ekonomi) dan W = *Wellbeing* (Kesejahteraan Individu).

Berikut adalah penjelasan dari keberlanjutan bank BNI sebagai dasar dari pembuatan laporan keberlanjutannya:

- *Nature* (Alam): BNI harus bisa menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungannya. Bagaimana dan apa yang akan dilakukan BNI untuk menjaga lingkungan sekitar.

- *Economy* (Ekonomi): BNI berusaha meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan. BNI terus membangun kemitraan yang dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Ini semua demi mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal.
- *Society* (Masyarakat): BNI terus berusaha untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masyarakat yang dapat mandiri dan bisa membawa profit bagi banyak pihak, baik dari sisi masyarakat, pemerintah, dan juga BNI sendiri.
- *Wellbeing* (Kesejahteraan Individu): BNI berusaha meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya prinsip berkelanjutan. BNI menanamkan rasa untuk memiliki perusahaan dengan membagi sahamnya untuk para pegawainya demi mencapai kesejahteraan individu lewat sistem kerja *reward and punishment*.

4.2 Triple Bottom Line BNI

Nilai yang dipegang teguh bank BNI sepanjang sejarahnya merefleksikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Memperkuat sistem manajemen, memperluas pemberian kredit, pembangunan infrastruktur, telah menjadi pendekatan BNI sejak lama. Sekarang, BNI mencoba memastikan agar segala hal terkait keberlanjutan dapat diimplementasikan secara luas.

Langkah – langkah yang diambil berpatokan pada sistem nilai yang dianut saat ini, yaitu prinsip 46, yang melambungkan tahun bersejarah berdirinya BNI dan melambungkan empat nilai kerja dan enam perilaku utama.

Untuk menciptakan karyawan yang berkualitas, BNI mensyaratkan profesionalisme dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. BNI juga melakukan survei tahunan karyawan yang menghasilkan temuan-temuan penting untuk menentukan arah peningkatan karir.

Sebagai BUMN, BNI tunduk pada berbagai peraturan khusus di antaranya Undang-undang No. 19/2007 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keputusan Menteri BUMN No. SE-433/2003, untuk melibatkan masyarakat dengan target pembiayaan tertentu, yaitu antara 1% sampai 4% dari pendapatan bersih. Sejalan dengan peraturan ini, BNI menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

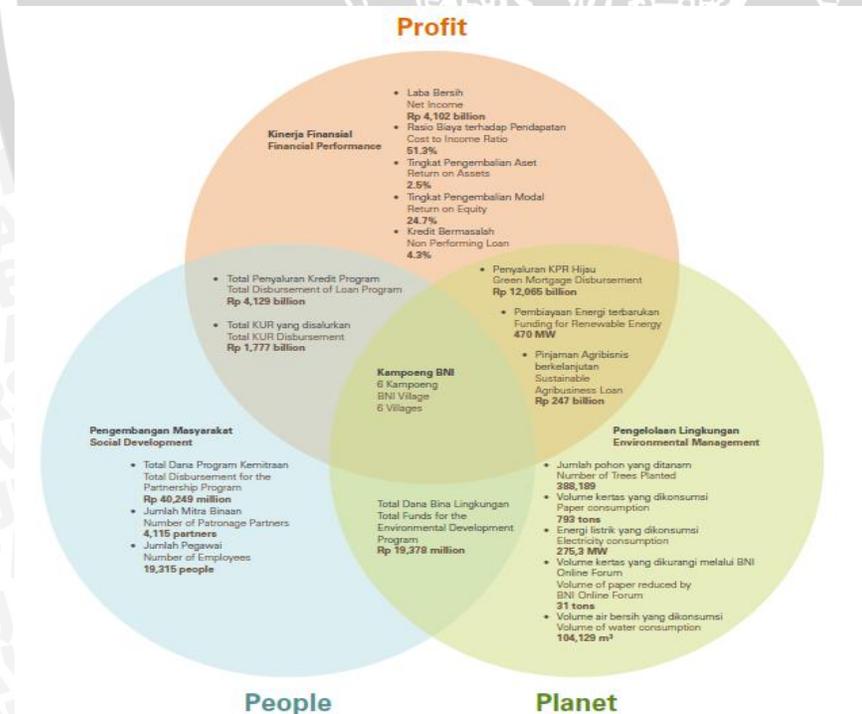
Program Kemitraan BNI adalah skema kredit bergulir dalam bentuk pinjaman lunak bagi pengusaha mikro/usaha kecil yang dianggap belum memenuhi persyaratan pinjaman dana bank (*bankable*). Program kemitraan berada di bawah pengawasan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan dan Divisi Usaha Kecil (USK) serta dikelola melalui Sentra Kredit Kecil dan Kantor Cabang *Stand Alone*. Pinjaman tanpa jaminan ini, yang biasanya tidak lebih dari Rp 10 juta (kira-kira USD 1.000),

memiliki tingkat suku bunga yang sangat rendah untuk memberi peluang bagi pengusaha kecil meningkatkan kondisi keuangan menjadi lebih baik.

Keterlibatan BNI baik dalam kalangan internal, nasabah, maupun pihak lain yang terkait sangatlah tertata dengan apik. Dengan senantiasa meraih laba dan secara berhati – hati melakukan pengawasan terhadap berbagai risiko, juga dengan selalu berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan lingkungan, BNI terus bergerak maju menuju ke arah yang benar, dan senantiasa kearah yang diharapkan.

Berikut adalah gambar dari *Triple Bottom Line BNI* tahun 2015 dimana menunjukkan hubungan yang seimbang antara *profit*, *planet*, dan *people* yaitu:

Gambar 4.3: Triple Bottom Line BNI



(Sumber: PT BNI (Persero) Tbk)

BNI membagi kegiatan CSR menjadi 3 kinerja besar yang dikenal dengan *Triple Bottom Line*. Berikut adalah rincian dari **gambar 4.3** antara lain:

- Kinerja finansial (ekonomi): BNI melakukan berbagai kegiatan yang berguna untuk mendukung keberlanjutannya. Untuk laba bersih yang didapat adalah sejumlah Rp 4.102 Miliar. Lalu, Rasio Biaya terhadap pendapatan (*Cost to Income Ratio*) sebesar 51,3 % ; Tingkat Pengembalian Aset (ROA) sebesar 2,5 % ; Tingkat Pengembalian Modal (ROE) sebesar 24, 7% ; dan jumlah kredit bermasalah sebesar 4,3 %.
- Kinerja pengembangan masyarakat (*people*): BNI melakukan kegiatan dimana dengan tujuan untuk mengembangkan potensi di masyarakat untuk mendukung proses keberlanjutannya. Berikut adalah rincian kegiatan BNI di bidang pengembangan masyarakat. Pertama, Total dana program kemitraan sebesar Rp 40.249 Miliar ; Jumlah mitra binaan sebesar 4.115 partner ; dan jumlah pegawai sebesar 19.315 orang
- Kinerja pengelolaan lingkungan (*planet*): BNI melakukan kegiatan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Berikut adalah beberapa kegiatan dari BNI yaitu: Jumlah pohon yang ditanam 388.189 pohon ; volume kertas yang dikonsumsi sebesar 793 Ton ; energi listrik yang dikonsumsi 275,3 MW ; Volume kertas yang dikurangi melalui BNI *Online Forum* sebesar 31 Ton ; dan volume air bersih yang dikonsumsi sebesar 104.129 m³

- Berikutnya, ada beberapa rincian tambahan yang dilakukan oleh BNI antara lain: Total dana Bina Lingkungan sebesar Rp 19.378 Miliar ; Total Kampoeng BNI 21 Kampoeng ; Total penyaluran kredit program sebesar Rp 4.129 Miliar ; Total KUR yang disalurkan Rp 1.777 Miliar ; Penyaluran KPR hijau sebesar Rp 12.065 Miliar ; Pembiayaan energi terbarukan 470 MW ; dan Pinjaman Agribisnis berkelanjutan sebesar Rp 247 Miliar

4.3 Keterlibatan dengan *Stakeholders*

Sebagai sebuah bank besar dalam negara yang besar, BNI sadar akan pentingnya masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tentunya disadari pula bahwa kesinambungan bisnis hanya dapat dicapai jika BNI melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, BNI memelihara berbagai media untuk melakukan dialog yang saling menguntungkan dengan semua pihak.

Dalam rangka memenuhi misi CSR (*Corporate Social Responsibility*), BNI mengikuti prosedur baku untuk menilai dan mengembangkan program CSR. Adapun tujuan CSR BNI adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan.
- Membantu penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan

- Melakukan kegiatan yang berguna bagi masyarakat khususnya di lokasi-lokasi dimana BNI berada.
- Membangun citra positif di mata masyarakat dan mendapatkan dukungan masyarakat dalam mencapai tujuan BNI
- Meningkatkan kepercayaan terhadap *brand* BNI dengan meningkatkan reputasi.
- Meningkatkan kesadaran publik akan keberadaan BNI melalui kegiatan sosial.

Sesuai dengan visi dan misi BNI serta arahan kementerian BUMN dalam hal pembangunan masyarakat (SE-433/MBU/2003) tanggal 16 September 2003 tentang Dana Pembangunan Masyarakat, program CSR BNI merupakan perwujudan dari komitmen Bank yang kuat untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan di masyarakat.

BNI sendiri memiliki hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan ini sangatlah penting bagi keberlanjutan usaha BNI. Pemangku kepentingan ini dikelompokkan oleh BNI dimana ada yang utama dan ada yang tidak. Hal ini dilakukan supaya BNI bisa lebih berfokus pada pihak mana saja yang dirasa dapat menguntungkan pihak BNI. Tidak hanya menguntungkan satu pihak melainkan juga pemangku kepentingan sendiri. BNI mengidentifikasi 8 (delapan) pemangku kepentingan utama yaitu:

Tabel 4.1 Delapan poin Kelompok Pemangku Kepentingan Utama PT BNI Tbk

Kelompok Pemangku Kepentingan	Aspek Utama	Mekanisme Pelibatan
Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> Layanan dan keluhan nasabah Stabilitas bank Program edukasi perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan layanan <i>call center</i> Survey kepuasan pelanggan Ikut serta dalam Pokja Edukasi “Ayo ke Bank”
Pemegang saham/ investor	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja operasi dan stabilitas perusahaan Tata kelola perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan kinerja Rapat Umum Pemegang Saham
Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan dan strategi BNI di kepegawaian Praktik ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Media internal yang mudah diakses pegawai <i>Employee Engagement Survey</i> Hubungan bipartit dengan serikat pekerja
Pemerintah dan Otoritas keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan atas peraturan perundangan yang berlaku Penerapan prinsip syariah 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan pelaksanaan kepatuhan dan notifikasi Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan studi yang diselenggarakan komite Laporan kepatuhan aspek syariah
Pemasok	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>merchant</i> BNI 	<ul style="list-style-type: none"> Seminar dan sosialisasi kebijakan
Organisasi bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Tata perbankan dan keuangan Perbankan dan Pembangunan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan dan keikutsertaan dalam kegiatan nasional dan regional Penandatanganan piagam UNEP- FI Pertemuan internasional
Organisasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan CSR oleh BNI 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kerja sama strategis terkait CSR
Media	<ul style="list-style-type: none"> Informasi terkait bisnis perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> Siaran pers Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan

Sumber: Laporan Keberlanjutan BNI

4.4 Corporate Social Responsibility BNI

BNI senantiasa melakukan perbaikan dimana – mana dan pembangunan yang diharapkan ke segala arah, dimana yang maksudnya perhatian BNI tidaklah terfokus ke satu hal namun juga terhadap masalah – masalah keberlanjutan dalam segala sektor, baik itu dalam masalah lingkungan hidup, pengurangan limbah, pemberian dukungan terhadap kegiatan – kegiatan sosial yang strategis dan dalam mengkomunikasikan masalah – masalah tersebut. BNI senantiasa memastikan keberlanjutan usahanya dengan menerapkan prinsip perbankan yang berhati – hati dan sistem manajemen yang baik. Dengan dukungan mitra di seluruh Indonesia dan dunia, BNI terus membangun bisnis dan komunitas yang kuat.

BNI sendiri membagi kegiatan CSR-nya kedalam 4 bagian yaitu:

- Program Kemitraan
- BNI Berbagi
- BNI *Go Green*
- Kampoeng BNI

4.4.1 Program Kemitraan

Adalah penyaluran pinjaman lunak pada masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil yang potensial. Pinjaman lunak ini diberikan kepada masyarakat yang disebut mitra binaan untuk meningkatkan produktivitas dan mewujudkan

kemandirian mereka. Termasuk dalam kegiatan Program Kemitraan adalah *capacity building* untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan, kepemimpinan, manajemen keuangan, program dan evaluasi serta kegiatan promosi guna membentuk dunia usaha yang efektif dan berkelanjutan.

Karakteristik mitra binaan adalah pengusaha yang belum mengenal perbankan secara teknis karena keterbatasan akses dalam menerima pinjaman dari perbankan. Besarnya potensi masyarakat pengusaha mikro yang belum tersentuh oleh praktik perbankan formal (*unbankable market*) adalah sasaran dari program kemitraan. Pengusaha mikro tersebut diharapkan dapat meningkatkan beberapa hal antara lain aktivitas usaha, modal/investasi, jiwa kewirausahaan akses ke perbankan, administrasi usaha, daya saing kualitas produk dan jangkauan pemasaran. *Capacity building* dilakukan melalui kegiatan bantuan teknik, meliputi pendidikan dan pelatihan, bantuan teknik khusus dan penguatan jaringan. Melalui kegiatan ini, para mitra binaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan memberdayakan diri mereka sehingga tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh.

Ditahun 2015, penyaluran dana Program Kemitraan BNI difokuskan pada Industri Kreatif, Agribisnis, dan Kemaritiman. Hal ini dilakukan karena dari ketiga bidang tersebut yang benar – benar menghasilkan potensi lebih. Dan juga mudah untuk melatih para masyarakat desa untuk terfokus pada bidang tersebut.

4.4.2 BNI Berbagi

Program BNI berbagi adalah program pemberdayaan kondisi masyarakat untuk mencapai taraf hidup lebih baik. Program tersebut dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan Peraturan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

PKBL diberikan dalam bentuk bantuan dana dan barang kepada masyarakat yang disalurkan dalam bentuk:

1. Bantuan Bencana Alam
2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan
4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum
5. Bantuan Sarana Ibadah
6. Bantuan Pelestarian Alam
7. Bantuan Sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan
8. Pendidikan Pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan

Tujuan dari program ini adalah:

1. Mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan

2. Mendorong pelaksanaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab
3. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitar dimana bisnis dilaksanakan pada khususnya
4. Membangun simpati masyarakat kepada perusahaan yang dapat menunjang terbentuknya citra positif perusahaan di mata publik
5. Meningkatkan pemahaman publik terhadap Perseroan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perseroan
6. Membantu pengentasan kemiskinan

4.4.3 BNI Go Green

Saat ini dunia sedang dihadapkan pada kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim termasuk dampak kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia. Mencermati kondisi ini, BNI secara proaktif mengambil bagian dalam upaya pemulihan lingkungan, salah satu caranya dengan membuat program dengan Nama BNI *Go Green*. Program *Go Green* ini merupakan salah satu misi BNI yakni meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Kepedulian BNI terhadap permasalahan lingkungan hidup karena sebagai organisasi, BNI memerlukan lingkungan dan alam yang terpelihara untuk *survival* kehidupan dan menjaga kontinuitas bisnis.

Untuk mengatualisasikannya, BNI menggunakan pendekatan 4 arah mata angin keberlanjutan (*compass of sustainability*) untuk diterapkan dalam praktik *corporate sustainability* dengan mempertimbangkan keberlanjutan: alam, sosial kemasyarakatan, sumber daya manusia, dan ekonomi. Empat arah mata angin keberlanjutan diinternalisasikan ke unit *business* dan *supporting* yang kemudian digunakan menjadi acuan dalam menghasilkan produk dan layanan perbankan yang ramah lingkungan.

Secara internal, BNI meningkatkan kapasitas pengetahuan pegawai mulai dari perilaku hidup hijau pegawai (*green attitude*), tindakan hemat energi, hingga pelatihan tentang risiko lingkungan dan sosial dalam analisa kelayakan kredit. BNI juga menyediakan produk dan layanan ritel yang mendorong gaya hidup hijau seperti KPR Hijau, kartu kredit BNI – WWF, Fitur adopsi orangutan dan penanaman pohon, dan layanan perbankan yang *paperless* (*e – billing, formless transfer*).

Sementara itu, di level eksternal BNI konsisten melaksanakan program – program pelestarian lingkungan hidup baik yang bersifat *forestry* maupun *non forestry*, termasuk pemanfaatan energi terbarukan. Program – program ini dilaksanakan baik melalui skema CSR maupun kredit komersial. BNI membiayai proyek – proyek ramah lingkungan yang dijalankan oleh klien BNI seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*), *biomass, hydro and waste management*. BNI juga mendirikan pusat pembibitan sejuta tanaman keras di Sentul Bogor dan membangun Hutan dan Taman Kota di beberapa kota di Indonesia.

Praktik *corporate social responsibility* membawa nilai bagi BNI dalam hal *positioning* dan *corporate identity*. Melalui *value of corporate sustainability*, BNI menciptakan *value*/nilai yang dapat bertahan lama dalam jangka panjang yang bermanfaat untuk kepentingan *stakeholder* dengan tetap memperhatikan keberlanjutan alam dan masyarakat. Bahkan sejak tahun pertamanya yaitu tahun 2009, BNI telah mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang berfungsi untuk melaporkan upaya - upaya yang telah dilakukan BNI dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

4.4.4 Kampoeng BNI

Kampoeng BNI adalah salah satu unggulan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BNI. Pertimbangan utama dalam pembentukan Kampoeng BNI adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan di suatu daerah. Konsep Kampoeng BNI mengacu pada prinsip *community development* dengan menampilkan produk unggulan atau ciri khas dari suatu daerah.

Program Kampoeng BNI dilakukan melalui penyaluran kredit lunak dengan sistem klaster di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, BNI memberikan bantuan Bina Lingkungan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampoeng BNI antara lain berupa pelatihan, pendampingan, sarana prasarana penunjang, dan promosi produk mitra binaan. Tujuannya untuk mengembangkan

potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat pada suatu kawasan khususnya kawasan pedesaan.

Saat ini sendiri sudah terdapat 21 Kampoeng BNI yang tersebar di Seluruh Indonesia dengan berfokus pada tiga sektor yaitu Industri Kreatif, Ketahanan Pangan, dan Kelautan. Untuk persebaran Kampoeng BNI antara lain: Kampoeng BNI Sektor Ketahanan Pangan di Lumajang dan Pujon. Kampoeng BNI Industri Kreatif diantaranya Kampoeng BNI Batik Tulis Lasem, Kampoeng BNI Tenun Sumsel, Kampoeng BNI Tenun Pandai Sikek, Kampoeng BNI Wisata Borobudur Magelang. Kampoeng BNI sektor Perikanan dan Kelautan antara lain Kampoeng BNI Muara Angke dan Kampoeng BNI Nelayan Brondong Lamongan.

4.5 Landasan pelaksanaan CSR

Landasan program CSR PT BNI dalam seperangkat peraturan dan undang – undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh BNI dalam keputusan dewan komisaris. Sejumlah landasan pelaksanaan CSR tersebut antara lain:

1. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneq BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah:

1. Bantuan korban bencana alam;
 2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 3. Bantuan peningkatan kesehatan;
 4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 5. Bantuan sarana ibadah;
 6. Bantuan pelestarian alam.
2. Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74
- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
 - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,

- Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

4. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p),:

Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

5. *Guidance* ISO 26000

Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9001: 2000 dan 14001: 2004. ISO 26000 hanya sekedar standar dan panduan, tidak menggunakan mekanisme sertifikasi. Terminologi *Should* didalam batang tubuh standar berarti *shall* dan tidak menggunakan kata *must* maupun *have to*. Sehingga Fungsi ISO 26000 hanya sebagai *guidance*.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan

tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Selain taat pada peraturan perundangan yang berlaku, BNI juga memilih standar GRI dalam pelaporannya. Hal ini telah didiskusikan oleh Dewan Komisaris BNI. BNI juga berupaya lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan pihak pemegang saham baik mayoritas dan minoritas maupun pemangku kepentingan lainnya.

4.6 Mekanisme Pelaksanaan CSR PT BNI

Mekanisme dalam pelaksanaan CSR oleh PT BNI antara lain:

1. Perusahaan melihat kejadian yang terjadi di masyarakat sekitar, apa yang masyarakat inginkan dan harapkan sesuai kebutuhan yang nyata. Lalu perusahaan melakukan analisis perencanaan

2. Pelaksanaan CSR dilaksanakan bersama masyarakat, pemerintah, dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya
3. Perusahaan BNI sebagai BUMN menjalankan program PKBL yang telah ditugaskan oleh pemerintah
4. Perusahaan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pembelajaran secara terus menerus
5. Perusahaan melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan apakah sudah berjalan dengan lancar.
6. Perusahaan menindaklanjuti hasil evaluasi dan mencatatnya dalam *Fact sheet* yang nantinya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun – tahun selanjutnya.

4.7 Kebijakan dan Program CSR PT BNI

Kebijakan PT BNI (Persero) Tbk dalam melaksanakan program CSR – nya harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan nilai dan norma yang ada. Kegiatan CSR senantiasa mematuhi semua aturan yang diberlakukan sehingga seluruh kegiatannya sejalan dengan kepentingan masyarakat luas dan juga lingkungan. Kebijakan PT BNI dalam melaksanakan kegiatan CSR diwujudkan dalam PKBL. Selain PKBL, BNI juga menerapkan kebijakan strategis yang dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Sinergi *Business Banking*

Bank BNI berusaha membangun bisnis dengan mitranya, tidak hanya dari lembaga atau pengusaha melainkan semua pihak yang berkepentingan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan memperkuat pangsa pasar BNI dan juga untuk membantu mitra yang kekurangan dana guna memperkuat pembangunan nasional dan mendukung perkembangan UMKM.

2. *Consumer and Retail*

Merupakan salah satu sektor industri yang menjadi pusat perhatian BNI dalam melakukan kebijakannya. Hal ini disebabkan globalisasi yang semakin pesat sehingga banyak sekali konsumen ritel yang membutuhkan bantuan dana. Konsumen ritel saat ini semakin kuat dan semakin membutuhkan sumber daya untuk melangsungkan keberlanjutannya, sehingga ini menjadi pusat perhatian dari Bank BNI.

3. *Subsidiary corporate* untuk mengoptimalkan keuntungan melalui pendekatan *value chain*.

Analisis *value chain* memandang perusahaan sebagai salah satu bagian dari rantai nilai produk, dimana merupakan aktifitas yang berawal dari bahan mentah sampai ke bahan jadi. Rantai nilai ini mencakup aktivitas yang terjadi karena adanya hubungan bank dengan pemasok, dan hubungan dengan konsumen. BNI sendiri memiliki anak perusahaan contohnya BNI syariah yang dimana berfokus pada nasabah – nasabah

yang menyukai produk syariah. Maka dari itu, dapat memaksimalkan keuntungan mereka melalui kebijakan ini.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan program CSR, PT BNI melaksanakan kegiatan yang diwujudkan dalam program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari laba BUMN yaitu BNI. Program ini berupa pemberian dana pinjaman dan pembinaan berupa pelatihan serta hibah kepada usaha kecil dan mikro yang memenuhi syarat.

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan. Dalam hal ini berupa bantuan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat, bencana alam, sarana dan prasarana, kesehatan masyarakat, pelestarian alam dan masih banyak lainnya.

4.8 Implementasi CSR PT BNI

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

BNI sendiri membagi penerapan CSR – nya menjadi 3 bagian besar yaitu:

1. BNI – Menuju kemajuan sumber daya manusia
2. BNI – Mencapai profitabilitas
3. BNI – Menjaga kelestarian alam

4.8.1 PROPER sebagai dasar pemikiran CSR BNI

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Perusahaan) diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pemberian pinjaman kepada pelaku industri dilakukan dengan mempertimbangkan biaya, terutama dalam hal penanganan masalah polusi yang pasti akan terjadi di setiap segmen industri. Oleh karena itu, BNI mengaplikasikan tiga prinsip untuk menilai dan mengambil beberapa langkah dalam rangka mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Pertama, BNI melakukan analisa kelayakan melalui “*firstway out*” (kinerja keuangan) dan “*second wayout*” (kecukupan jaminan). Kedua, BNI melakukan analisis kredit dengan menggunakan *Customer Risk Rating* dan *Customer Credit Rating*, yang mencakup tingkat kepedulian debitur terhadap lingkungan sebagai salah satu parameternya.

Ketiga, BNI secara ketat mensyaratkan debitur untuk mengaplikasikan sistem PROPER yang dikeluarkan oleh KLH RI guna mempertimbangkan kelayakan kredit.

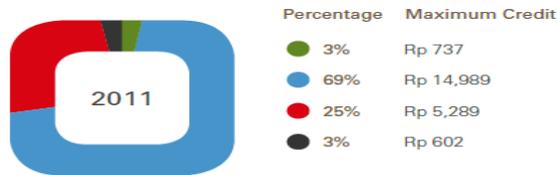
Setelah metode ini dilakukan dan debitur terbukti memiliki rating Hitam atau Merah, maka di samping mengarahkan agar debitur segera menanggapi regulasi lingkungan yang berlaku, BNI juga harus memastikan bahwa debitur dapat segera memperbaiki manajemen lingkungannya. Standar PROPER yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia termasuk unik bagi suatu Negara berkembang sebagai “insentif reputasi” yang telah berdampak terhadap pergerakan bisnis dari ketidakpatuhan menuju kepatuhan”, menurut laporan Bank Dunia yang dikeluarkan pada tahun 1998. Pada tahun 2010, telah tercatat sebanyak 690 perusahaan dalam program ini dan dengan peningkatan anggaran PROPER dari KLH program ini melibatkan 995 perusahaan pada tahun 2011. Total kredit yang diberikan kepada 64 debitur BNI yang terdaftar dalam program PROPER tahun 2011 mencapai Rp 21, 61 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan sesuai dengan rating kepatuhan wajib dari Biru dan Hijau mencapai Rp 15, 72 triliun (72, 75%).

Hubungan BNI dengan Pemerintah Indonesia sangat harmonis, dengan memanfaatkan sejumlah program pemerintah seperti sistem PROPER maupun dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Mengingat Pemerintah Indonesia juga merupakan pemegang saham mayoritas, transparansi menjadi demikian penting dalam penyajian tanggung jawab sehingga secara rinci telah dijelaskan dalam Laporan Keberlanjutan. Selain pelaporan mengenai dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham,

pelaporan juga mencakup saldo simpanan dan pinjaman, yang pada tahun 2011 masing-masing tercatat sebesar Rp 231.296 miliar (simpanan) dan Rp 163.533 miliar (pinjaman), dibandingkan dengan Rp 194.375 miliar (simpanan) dan Rp 136.357 miliar (pinjaman) pada tahun 2010.

Gambar 4.4: PROPER BNI

Jumlah Kredit BNI yang mendapat Peringkat PROPER 2011 (Rp miliar)
Total Credit Given by BNI based on PROPER Rating 2011 (in Rp billion)



(Sumber: PT BNI (Persero) Tbk)

4.8.2 BNI – Menuju Kemajuan Sumber Daya Manusia

Sebagai perusahaan jasa, bisnis utama BNI berhubungan secara langsung dengan individu – kreditur, nasabah, regulator, masyarakat dan karyawan BNI sendiri. BNI telah mampu membangun hubungan yang baik dan proaktif dengan semua pihak dan seluruh kelompok masyarakat Indonesia. Karyawan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan layanan pada nasabah dan dalam membantu kemajuan Bank. BNI memperlakukan karyawan secara adil apapun agama dan jenis kelaminnya, dan telah membakukan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk menjadi pedoman bagi manajemen dalam memberikan penghargaan dan kenaikan pangkat atau jabatan. Hubungan antara karyawan dan manajemen terjalin berdasarkan kerjasama yang baik, dimana pihak bank melakukan kesepakatan bersama dengan serikat pekerja setiap dua tahun.

Dalam industri perbankan di Indonesia, Remunerasi dan tunjangan lainnya yang diberikan BNI masih tetap kompetitif terlebih lagi bila dibandingkan dengan dunia pekerjaan pada umumnya. *Turn over* karyawan, sebagai hasil dari kondisi kerja yang memuaskan ini cukup rendah, kurang dari 2% untuk karyawan pria dan wanita. BNI memiliki komitmen untuk senantiasa menyediakan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan.

Benefit lainnya yang disediakan BNI meliputi peningkatan kemampuan dalam hal manajemen, kepemimpinan dan teknis. BNI menyelenggarakan berbagai program pelatihan untuk memastikan bahwa BNI dapat secara berkelanjutan mempromosikan karyawan-karyawan yang memiliki kemampuan sesuai posisi yang dibutuhkan. Untuk mengikuti prinsip belajar sepanjang usia dan untuk mendukung karir, serta penilaian tahunan seluruh karyawan, BNI membantu karyawannya untuk menjadi *Certified Financial Analyst* dan *Certified Financial Planners*.

Selain itu, seluruh karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam bekerja. Pelatihan ini diharapkan bisa memberikan pengalaman lebih bagi karyawan. Dan juga ini menambah nilai lebih dalam hal skill yang dibutuhkan oleh karyawan. Pelatihan ini diharapkan menambah pengalaman karyawan untuk lebih mahir dalam bekerja. Di antara pelatihan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan di **tabel 4.2** dibawah ini:

Tabel 4.2 Program Pelatihan BNI

Program Pelatihan	Kategori pegawai dan tugasnya	Jumlah peserta	Jam Program	Rata – rata jam kerja
<i>Advance Credit</i>	Pemimpin SKM, SKC, RKW, RKC	120	49	49
BCM syariah	APB KCS	16	196	196
BCM syariah untuk Pimpinan KCS/ Pengelola USY	Pimpinan KCS, Pengelola USY	19	70	22
<i>Financial and Credit Analysis untuk SPI</i>	Staf auditor	82	21	21
Implementasi Program Penyelesaian Piutang Macet HB	Staf Kredit Khusus di SKC, STA, Dan SKM dengan HB/PX	40	7	7
Manajemen perkreditan segmen usaha menengah	Staf Auditor	40	84	42
CAK untuk menengah dan korporasi	Calon CA <i>Middle/Corporate</i>	25	147	147
<i>Manajemen Collection Tkt Pemimpin USK</i>	Pemimpin SKC	59	28	32
Perkreditan Calon RM	Calon RM <i>middle</i>	63	105	105
Perkreditan untuk Calon Analisis Standar	Calon CA Standar	243	105	105
<i>Perkreditan untuk OBC project</i>	Staf TA baru	38	84	84
<i>Perkreditan untuk OBC Project (KLN Tipe B)</i>	Staf KLN Plus	156	112	112

(Sumber: PT BNI (Persero) Tbk)

Dalam berinteraksi dengan nasabah BNI mengukur kinerjanya melalui survey tahunan yang dilakukan oleh pihak luar. Survei tahun 2010 memperlihatkan bahwa disamping kemampuan BNI memenangkan persaingan di berbagai aspek, ruang untuk perbaikan masih terbuka dengan memperkuat *brand* BNI agar dapat meningkatkan loyalitas nasabah.

Berikut adalah beberapa program yang dilakukan oleh BNI dalam rangka mendukung keberhasilan program pegawai demi menuju kemajuan sumber daya manusia antara lain sebagai berikut:

a. Penanganan komplain

Bank BNI memiliki *call center* guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Panggilan ini akan ditangani secara professional dan dinilai dengan mengikuti standar *quality control*. Keluhan nasabah akan ditangani serisus untuk menjaga kepuasan pelanggan dan juga untuk mengidentifikasi kelemahan sistematis.

Berikut adalah **tabel 4.3** yang berisikan tentang penanganan komplain yang dilakukan BNI sampai dengan tahun 2015 antara lain:

Tabel 4.3 Penanganan Komplain

Keterangan	Kartu Kredit	Produk Perbankan
Jumlah keluhan	14.999	28.229
Keluhan yang sudah diselesaikan	14.870	22.252
Keluhan yang belum diselesaikan	129	5.977

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT BNI 2015

b. Kepatuhan

Dengan Internal Audit yang kuat dan sistem akuntabilitasnya, BNI telah memenuhi peraturan pemerintah Indonesia dan dengan rekam jejak yang baik, BNI dapat memberikan jaminan bahwa Bank terlindungi dari individu-individu yang berniat melakukan tindakan penipuan.

Berikut adalah beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan BNI dalam rangka menuju kepatuhan yang teratur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa kegiatannya yang akan dijelaskan di

Tabel 4.4 yaitu:

Tabel 4.4 Pelatihan untuk Kepatuhan

Keterangan Pelatihan	Tanggal
Pengawasan Nasional terhadap Manajemen Keuangan & Gratifikasi yang berasal dari Dana dan kredit Pihak Ketiga	19 – 20 Mei
Upaya pencegahan tindak korupsi oleh karyawan, manajer BUMN dan perusahaan lokal	4 – 5 Agustus
Upaya Whistle Blower untuk Mencegah Kejahatan dan Korupsi	23 November

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT BNI

c. Pemberdayaan masyarakat (PKBL)

Bagi masyarakat, BNI telah melakukan sejumlah program pemberdayaan dan program pendampingan untuk memenuhi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

BNI membagi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam banyak hal seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kemitraan, dan lain – lain. Menurut peraturan Menteri Negara BUMN no. 05/MBU/2007 tentang PKBL dimana penyisihan laba bersih BUMN setelah pajak sebesar 4% dialokasikan untuk kegiatan PKBL. Dimana nantinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan yang lebih baik.

Program kemitraan Kampong BNI difokuskan pada bidang industri Kreatif dan mendukung ketahanan pangan melalui program “Kampong BNI”, yaitu suatu program pemberdayaan masyarakat dalam suatu kawasan dengan konsep klaster untuk optimalisasi dan efektivitas program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan utama pembentukan “Kampong BNI” adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di suatu kawasan pedesaan melalui pinjaman lunak program kemitraan maupun bantuan dalam rangka penguatan kapasitas bagi masyarakat di daerah tersebut. Dengan program pemberdayaan ini diharapkan akan berdampak luas terhadap peningkatan derajat hidup masyarakat di sekitar “Kampong BNI”.

Program “Kampong BNI” telah dilakukan sejak tahun 2007, dan banyak kampong BNI telah berdiri antara lain: Kampong BNI Jagung - Tasikmalaya, Kampong BNI Ulat Sutera - Imogiri Yogyakarta, Kampong BNI Sapi - Subang,

Kampoeng BNI Tenun Songket - Ogan Ilir Sumatera Selatan, Kampoeng BNI Sentra Produk Jagung di Solok, Sumatera Barat, Kampoeng BNI Budidaya Pisang di Lumajang Jawa Timur, Kampoeng BNI Pengolahan Hasil Laut di Lamongan, dan masih banyak lagi lainnya.

Program Bina Lingkungan bertujuan untuk menjawab kebutuhan nyata dari masyarakat dengan melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Kegiatan Bina Lingkungan BNI dilaksanakan dalam berbagai bidang, yaitu:

- **Bidang Bencana Alam**

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam, BNI secara aktif terlibat dalam penyaluran bantuan untuk meringankan beban bagi warga yang tertimpa bencana, antara lain di Kampar-Riau, Ambon-Maluku, Bima-NTB, Padang-Sumatera Barat dan Soreang-Bandung, korban bencana angin puting beliung di Makassar dan korban bencana letusan Gunung Soputan di Manado.

- **Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Aktivitas BNI di bidang pendidikan antara lain bantuan pembangunan gedung di STTS (Sekolah Tinggi Teknologi Sumbawa) yang bertujuan untuk pemantapan proyek percontohan pusat pengembangan madu hutan Sumbawa, revitalisasi Pojok BNI yang telah dijalankan BNI sejak tahun 2006 pada 8 (delapan) Perguruan Tinggi.

• Bidang Kesehatan

Salah satu program dukungan kesehatan yang dilakukan oleh BNI adalah berupa donasi lima kendaraan Unit Donor Darah (UDD) kepada organisasi Palang Merah Indonesia (PMI). Sarana kendaraan ini memungkinkan penyelenggaraan kegiatan donor darah dapat dilakukan dimana saja tanpa terkendala tempat, sehingga sangat sesuai untuk mendukung program donor darah lifestyle yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan dan dikemas dengan acara hiburan. Pembangunan sarana LSM MER – C (*Medical Emergency Rescue Committe*) terus berlanjut dengan pengoperasian 46 klinik kesehatan di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Fasilitas tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di daerah perkotaan yang tidak terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai.

• Bidang Sarana dan Prasarana Umum

BNI telah mendukung pembangunan dan pemeliharaan sarana umum di Kampong BNI, sarana untuk panti-panti sosial, dan pembangunan sarana air bersih dan kebersihan lingkungan di berbagai lokasi di Indonesia. BNI juga mendukung program pengelolaan sampah di sungai Ciliwung, Jakarta.

• Bidang Sarana dan Prasarana Ibadah

Dalam rangka menyambut bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, BNI menyelenggarakan kegiatan ceramah keagamaan dan buka puasa bersama di

33 provinsi di seluruh Indonesia. BNI juga melaksanakan program *retreat* bagi kaum muda kristiani dengan mengambil tema disiplin diri dan cinta tanah air.

• **Bidang Pelestarian Lingkungan**

BNI melaksanakan beberapa program untuk mendukung pelestarian lingkungan seperti pembangkit listrik *pico hidro* dan *biogas* di Sulawesi Utara, Kali Ciliwung Bersih, penghijauan di seluruh Indonesia, hutan kota dan taman kota, *Earth Hour*, dan penangkaran penyu di Koba Bangka Tengah. BNI bekerja sama dengan LSM dari Belanda yaitu HIVOS mengembangkan program *biogas* untuk mengurangi laju deforestasi dan memberdayakan masyarakat dengan mengurangi biaya bahan bakar, meningkatkan pendapatan dari kompos alami, dan meningkatkan kualitas pertanian setempat. Lalu juga BNI melakukan penanaman 10.000 pohon dan menyalurkan kredit kemitraaan pada masyarakat pedesaan untuk mengembangkan produk lokal.

• **Program BUMN Peduli**

Partisipasi BNI dalam program BUMN Peduli difokuskan pada upaya meringankan beban masyarakat sebagai akibat kenaikan harga sembako pada saat bulan puasa, menjelang Idul Fitri dan perayaan Natal. Melalui pelaksanaan kegiatan Pasar Murah di beberapa kota di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.

4.8.3 BNI – Mencapai Profitabilitas

Dilihat dari perspektif keberlanjutan, kemampuan untuk menghasilkan laba timbul dari sistem tata kelola berkelanjutan yang kuat dan berfungsi dengan baik. BNI berupaya untuk meningkatkan struktur tata kelola perusahaan dan kerangka kerjanya sesuai dengan perkembangan terakhir seperti *Basel Accord II*, *Sarbanes-Oxley Act*, cetak biru Arsitektur Perbankan Indonesia, dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional. BNI memenuhi seluruh persyaratan transparansi seperti menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit setiap triwulan dan tahunan.

Pada tahun 2008, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk menerapkan *Basel II* secara bertahap untuk mendorong industri perbankan Indonesia dalam memenuhi standar internasional. *Basel II* mewajibkan dimasukkannya risiko pasar dan risiko operasional dalam perhitungan kecukupan modal. Persyaratan baru kecukupan modal ini diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2009 untuk bank dengan aset lebih dari Rp 1 triliun (sekitar USD 112 juta). BNI sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan peraturan ini dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menerapkan standar *Basel Accord* lebih lanjut.

BNI berjalan dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BNI berupaya untuk memenuhi semua persyaratan perundang undangan, termasuk larangan memberi kontribusi terhadap partai politik.

Sejak awal didirikannya, BNI telah mendedikasikan diri untuk menggerakkan pembangunan ekonomi dan industri di Indonesia. Kontribusi terbesar ekonomi yang telah dicapai justru terletak pada dampak tidak langsung yang dihasilkan dari proyek investasi yang dibiayai. BNI memiliki alasan untuk mempercayakan kontribusi yang besar ini pada kesepakatan yang saling menguntungkan dengan beberapa perusahaan industri besar di Indonesia, yang telah terbukti terus berkembang dan memberikan kontribusi ekonomi yang kuat bagi bangsa bahkan setelah mereka melunasi fasilitas pinjamannya.

BNI juga berkontribusi membangun masyarakat secara berkelanjutan dengan membantu penduduk lokal dalam mengembangkan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan ekonomi. Salah satu proyek tersebut adalah Kampoeng BNI Tenun Songket, yang antara lain bertujuan untuk mendukung kekayaan warisan budaya Indonesia, membantu pemasaran produk, memberikan keterampilan kepada generasi penerus, dan memotivasi masyarakat setempat untuk mengembangkan industri tenun sebagai mata pencaharian utama mereka.

BNI terus berupaya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang maksimal. Hal ini diterapkan dalam berbagai kegiatan yang sekiranya dapat mencapai tujuan ekonomi maksimal. Berikut adalah beberapa kegiatan BNI dalam rangka mencapai profitabilitas yang sesuai dengan dasar 3P antara lain:

Tabel 4.5: Program Kredit BNI

NO.	Keterangan	Total Penyaluran (Rp)	Baki debit (Rp)
1	Kredit Ketahanan pangan	617.023.014.234	241.345.473.626
2	Kredit Usaha Rakyat	3.158.488.509.825	1.777.623.676.508
3	Kredit Usaha pembibitan sapi	53.662.417.278	45.584.650.407
4	Kredit Pengembangan Energi Nabati	195.219.501.100	40.511.884.151
5	<i>Industrial Efficiency and Pollution phase 1</i>	23.056.654.200	15.294.198.090
6	<i>Industrial Efficiency and Pollution phase 2</i>	51.949.500.000	41.595.041.115
7	Kredit Likuiditas Bank Indonesia	-	25.134.086.613
8	<i>Eksport Import Development program</i>	23.556.431.700	8.233.533.270
9	<i>Pollution Abatement Equipment</i>	5.885.387.000	624.207.730
Total		4.128.841.415.337	2.196.576.748.510

(Sumber: PT BNI (Persero) Tbk)

Bersama dengan Cita Tenun Indonesia (sebuah yayasan yang berkaitan dengan pelestarian tenun) dan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, BNI membangun pusat - pusat pengembangan industri Tenun Songket. BNI telah menyalurkan credit sebesar Rp 1, 5 miliar kepada 250 pengrajin tenun untuk menarik dan membantu warga setempat menjadi pengrajin Songket.

4.8.4BNI – Menjaga Kelestarian Alam

Dalam upayanya untuk menggalakkan pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan secara nasional, BNI mencoba menekankan bahwa untuk menjalankan bisnis yang berkesinambungan dibutuhkan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai salah satu dari sedikit lembaga keuangan yang memberikan Laporan Keberlanjutan di Indonesia, BNI menyadari sulitnya perubahan pola perilaku. Upaya BNI untuk menciptakan kepedulian terhadap lingkungan hidup mampu meraih kesuksesan baik di internal Bank maupun di dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi yang terus tumbuh dalam kegiatan yang bertanggung jawab pada lingkungan memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa penerapan kebijakan yang baik terhadap lingkungan dapat menghasilkan keuntungan finansial yang cepat. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan misi “Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan”, BNI juga akan mewujudkan kinerja keuangan yang lebih baik dan pada saat yang sama berkontribusi untuk keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

BNI terus mengembangkan kemitraan strategis dengan dengan beberapa pihak untuk melatih dan mempromosikan berbagai masalah lingkungan di seluruh Indonesia, serta dengan kemitraan global di seluruh dunia. Berdasarkan model Atkisson, *roadmap* telah dibentuk yang meliputi pendekatan internal maupun eksternal. Secara internal, kampanye poster 2010 telah menyebarkan pesan positif berupa Sikap Peduli Lingkungan, di sisi lain BNI juga telah mengirimkan banyak peserta ke sejumlah kegiatan nasional dan internasional yang mendukung sikap

keberlanjutan dan “gaya hidup hijau”. Selain itu, BNI juga mendukung prakarsa karyawan termasuk *Bike to Work*, dengan membangun fasilitas parkir sepeda. Saat ini, dengan lebih dari 1.500 anggota terdaftar, yang beberapa diantaranya adalah karyawan BNI, mereka mengelola sebuah situs lingkungan serta melakukan kegiatan yang mendukung pemeliharaan lingkungan di Jakarta dan sekitarnya. Secara eksternal, BNI berkomitmen untuk memperkenalkan produk seperti BNI Griya yang memenuhi permintaan pasar untuk *Green Banking*. Sebagai pelopor dalam *Green Mortgage* di tahun 2005, bisnis KPR BNI Griya telah tumbuh dengan cukup besar. Pangsa pasar BNI Griya tahun 2010 mencapai 8,58%, atau sebesar Rp 12.065 miliar.

KPR ini diarahkan untuk pembangunan perumahan yang selaras dengan ekosistem sekitarnya, termasuk kepatuhan pada rencana tata ruang, lokasi di luar daerah resapan air dan ruang terbuka hijau. Untuk mendesain produk ini, BNI bekerja sama dengan berbagai akademisi, komunitas desain hijau, Asosiasi *Real Estate Indonesia* (REI), *Federation Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Immobiliers Agent* (FIABCI) dan para pengembang.

BNI melakukan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat menyelamatkan lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa kegiatan penyelamatan lingkungan yang telah dilakukan BNI dari tahun 2010 – 2015 yaitu:

Tabel 4.6: Daftar Kegiatan CSR BNI dalam bidang lingkungan alam

Keterangan Kegiatan	Tempat	Tahun
BNI berperan sebagai narasumber pada diskusi Bank Indonesia tentang peraturan Green Banking di Indonesia	Jakarta	2010
BNI menyelenggarakan pelatihan “CDM dan Mitigasi Risiko Lingkungan pada sektor Panas Bumi, Batubara dan Kelapa Sawit”	Jakarta	2010
BNI mendukung Earth Hour 2010 dengan memadamkan lampu di Gedung BNI dan Wisma 46 selama 60 menit	Jakarta	2010
BNI sebagai anggota Komite pengarah Global pada rapat umum tahunan UNEP-FI di Cape Town,	Cape Town, Afrika	2010
Penanaman Pohon di Boekit Imogiri, Yogyakarta	DI Yogyakarta	2010
Program Penanaman Pohon di Temanggung	Jawa Timur	2010
Adopsi Orangutan	Kalimantan Timur	2011
Taman Kota BNI	Banda Aceh	2011
Penanaman dan Distribusi 1.000.000 tanaman keras	Sentul, Bogor, Jawa Barat	2011
Pengembangan Hutan rakyat	Blitar	2011
Bantuan penanaman pohon NTB	NTB	2011
Sarana digester Biogas	Sumba, NTT	2011
Program Kali Ciliwung Bersih	Jawa Barat	2012
Penangkaran Penyu	Bangka Tengah	2012
Kerjasama BNI - WWF	NTB	2012
Dukungan Pulau Sumbawa	NTT	2012
Pengurangan Volume Kertas	Indonesia	2013
Hutan Kota BNI	Banda Aceh	2013
<i>Earth Hour</i>	Indonesia	2013
Desa Ekowisata BNI	Indonesia	2014
<i>Bike to Work</i>	Indonesia	2014
<i>Training Solar PV</i>	Indonesia	2014
Lestarkan Pohon Bambu	Jawa Barat	2015
Bantuan Traktor Pertanian	Bima, NTB	2015
Tower Air Waingapu	Sumba, NTT	2015

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT BNI

4.9 Pelaporan CSR

Pelaporan CSR dibagi menjadi dua pengungkapan, yaitu Pengungkapan secara wajib atau yang bisa disebut *mandatory disclosure*, yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten (perusahaan) yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu Negara. Lalu yang kedua, adalah Pengungkapan secara sukarela atau yang bias disebut *voluntary disclosure*, yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan secara sukarela tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Di Indonesia sendiri, pengungkapan ini masih bersifat sukarela, namun sekarang sudah banyak undang – undang yang mewajibkan beberapa perusahaan yang mampu dalam melaporkan kegiatan CSR – nya.

CSR sendiri telah terbukti membawa dampak positif bagi emiten baik secara ekonomi dan juga citra perusahaan. Namun, keberhasilan program CSR suatu perusahaan harus dilihat dari 2 aspek yaitu pelaksanaan (implementasi) dan komunikasi. Sejauh mana CSR memberikan manfaat tidak hanya bagi kelompok tertentu yang menerima dampak CSR tapi juga bagi perusahaan pelaksana CSR. Supaya bisa memberikan dampak positif, perusahaan harus mampu mengkomunikasikan CSR- nya secara tepat dan maksimal.

Di Indonesia, CSR atau dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan perlahan-lahan telah menjadi bagian yang sangat penting dari dunia usaha. CSR secara pelan tapi pasti tidak hanya dianggap sekedar sumbangan atau formalitas

semata tapi juga sudah menjadi agenda wajib atau rencana strategis perusahaan. Jenis, model dan cakupan CSR perusahaan di Indonesia juga semakin beragam dan dinamis

Akan tetapi, pengkomunikasian CSR di Indonesia masih terbatas dan biasanya hanya dalam bentuk laporan tahunan yang memuat CSR dan atau laporan khusus CSR atau dikenal dengan *CSR/Sustainability Reporting*. Pelaporan CSR hanyalah salah satu bagian kecil dari kegiatan komunikasi CSR. Masih banyak perusahaan yang belum secara maksimal mengkomunikasikan kegiatan CSR. Perusahaan sepertinya masih terfokus pada keberhasilan pelaksanaan CSR semata. Pemahaman akan pentingnya komunikasi CSR masih dalam tahap formalitas yaitu pembuatan laporan kegiatan CSR, laporan tahunan yang memuat informasi CSR ataupun laporan khusus tentang CSR atau lebih dikenal dengan *CSR/Sustainability Reporting*.

Secara garis besar, komunikasi CSR mencakup 3 komponen yaitu (1) *contents* (isi); *what to communicate*, (2) *to whom communicate*; *audiences* (khayalak sasaran), dan (3) *by using what channels* (*channels / media*), yang pemilihannya sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Dengan kata lain, komunikasi CSR tergantung dari apa yang disampaikan, kepada siapa dan dengan cara apa.

4.9.1 Bentuk dan Sistematika Pelaporan CSR

Bentuk dan sistematika pelaporan yang dimaksudkan disini bukan mengarah pada isi atau hal yang harus ada dalam laporan, tapi lebih mengarah pada bagaimana perusahaan menyampaikan kegiatannya. Pelaporan CSR yang baik memuat kegiatan – kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial dan juga memuat ilustrasi yang menarik agar memberikan kenyamanan pada pembaca.

Kebanyakan perusahaan menunjukkan kegiatan CSR – nya dalam bentuk laporan yang bersifat naratif. Biasanya dalam bentuk naratif ini, perusahaan cenderung menjelaskan “berita baik” dalam kegiatan CSR – nya. Menurut Welson (2009), bahwa bentuk laporan yang bersifat naratif cenderung bukan menjadi satu evaluasi sehingga banyak sekali kasus terulangnya “berita baik” di tahun tahun selanjutnya. Tidaklah salah dalam menulis laporan yang seperti ini, namun hal ini rentan untuk menaikkan citra perusahaan secara berlebihan. Bahkan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kegiatan pada laporan CSR dengan kenyataan yang ada.

Laporan CSR memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Milne et.al. menjelaskan bentuk dalam laporan CSR, yaitu:

1. Narativisasi adalah upaya untuk menanamkan cerita atau uraian yang menegaskan sesuatu. Dengan penjelasan naratif, pembaca dimungkinkan masuk lebih dalam pada poin yang ingin disampaikan penulis. Gaya penulisan naratif biasanya menimbulkan efek yang lebih persuasive.

2. Eufimisasi adalah penjelasan suatu tindakan dengan cara sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesan positif seolah – olah hanya ada perbedaan yang tipis atau bias disebut upaya untuk memperhalus bahasa dan penyampaian suatu fakta
3. *Trope (metafore)* adalah penggunaan bahasa figuratif untuk menjelaskan sesuatu. Bentuk biasanya berupa perumpamaan – perumpamaan yang membutuhkan waktu dan pemikiran untuk mencernanya.
4. Pasivisasi adalah pengubahan tindakan menjadi kata benda, pasivisasi meliputi pula penghilangan atau penyamaran penyebutan pelaku atau subjek peristiwa, sehingga diperoleh kesan bahwa peristiwa – peristiwa yang terjadi berada di luar kendali actor atau subjek pelakunya.

Standar pelaporan di Indonesia saat ini adalah GRI. Hal ini karena GRI standar yang mudah diterapkan dan mudah dipahami. Pedoman GRI sendiri menawarkan dua pilihan untuk organisasi dalam mempersiapkan laporan keberlanjutannya. Ada dua hal yaitu Opsi inti dan Opsi komprehensif. Opsi inti sendiri menyediakan latar belakang bagaimana organisasi berkomunikasi, apa saja dampak kinerja ekonominya, sosial, dan lingkungan. Hal itu merupakan unsur penting dari laporan keberlanjutan. Sedangkan untuk Opsi komprehensif berisikan hal – hal yang lebih lengkap dari opsi inti yaitu ditambahkan dengan standard pengungkapan strategi perusahaan, tata kelola, etika dan integritas.

Tabel 4.7: Tabel Pengungkapan Standard

TABLE 3: REQUIRED GENERAL STANDARD DISCLOSURES		
General Standard Disclosures	'In accordance' – Core (This information should be disclosed in all cases)	'In accordance' – Comprehensive (This information should be disclosed in all cases)
Strategy and Analysis	G4-1	G4-1, G4-2
Organizational Profile	G4-3 to G4-16	G4-3 to G4-16
Identified Material Aspects and Boundaries	G4-17 to G4-23	G4-17 to G4-23
Stakeholder Engagement	G4-24 to G4-27	G4-24 to G4-27
Report Profile	G4-28 to G4-33	G4-28 to G4-33
Governance	G4-34	G4-34 G4-35 to G4-55(*)
Ethics and Integrity	G4-56	G4-56 G4-57 to G4-58(*)
General Standard Disclosures for Sectors	Required, if available for the organization's sector(*)	Required, if available for the organization's sector(*)

(Sumber: www.globalreporting.org)

4.10 Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan CSR

BNI sudah menjalankan CSR – nya dalam jangka waktu yang cukup lama dari tahun 2008 – Sekarang. Adapun beberapa alasan BNI untuk tetap melakukan CSRnya adalah sebagai berikut:

- **Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan.**

Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan, sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongkrak *image* dan reputasi positif perusahaan. *Image* yang positif ini penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan

- **Layak Mendapatkan *sosial licence to operate***

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada

perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

- **Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan**

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan *stakeholders* akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholders* perlu mendapat perhatian.

- **Melebarkan Akses Sumber Daya**

Track records yang baik dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

- **Membentangkan Akses Menuju Market**

Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

- **Mereduksi Biaya**

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *Corporate Social Responsibility*. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

- **Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder**

Implementasi *Corporate Social Responsibility* akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder, dimana komunikasi ini akan semakin menambah *trust stakeholders* kepada perusahaan.

- **Peluang Mendapatkan Penghargaan**

Banyaknya penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada pelaku *Corporate Social Responsibility* sekarang, akan menambah kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan *award*.

Lalu adapun hambatan BNI dalam melakukan CSR antara lain:

- **Undang – Undang di Indonesia tentang CSR yang sifatnya kurang mengikat**

BNI sebagai BUMN harus patuh pada peraturan pemerintah yang berlaku. Namun, ada beberapa hal yang menimbulkan kekhawatiran BNI dalam melakukan CSR – nya. Contohnya dalam UU no. 40 tahun 2007 dimana isinya tidak serta merta memaksa perusahaan untuk melaksanakan CSR, karena didalam undang – undang ini tidak memberikan kejelasan

terhadap sanksi jika perusahaan tidak menjalankan CSR – nya. BNI tidak tahu sanksi apa yang akan diberikan karena memang ketidakjelasan dari Undang – undang ini. Lalu juga UU no. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menegaskan penanam modal juga harus bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, berarti BNI wajib memprogramkan kegiatan CSR sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan dan membentuk hubungan yang harmonis dengan *stakeholders*.

- **CSR hanya sebagai pengelabuan citra perusahaan**

Karena tidak jelasnya undang – undang yang mengatur CSR di Indonesia, maka ada beberapa perusahaan yang cenderung melaksanakan CSR – nya secara tidak berkelanjutan dan akuntabel apalagi transparansinya diragukan. Sebagian perusahaan menggunakan CSR hanya sebagai *marketing* untuk mendapat citra lebih dari masyarakat padahal itu semua hanya pengelabuan mereka ke masyarakat mengenai citra asli mereka.

- **Masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan CSR**

Masyarakat Indonesia sendiri kebanyakan belum bisa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan CSR yang bersifat partisipatif, yang mana masyarakat diajak langsung untuk berubah tanpa hanya mengandalkan bantuan saja yaitu berupa kucuran dana dari BNI. Masyarakat masih belum siap untuk menerima budaya seperti ini dan terkadang masyarakat merasa tidak puas terhadap apa yang diberikan oleh perusahaan yaitu BNI.

4.11 Permasalahan dan Pemecahannya dalam Pelaksanaan CSR

Proses implementasi dari PT BNI Tbk selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tapi ada beberapa hal yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan ada beberapa masalah yang timbul dari kegiatan CSR yang telah dilaksanakan. Berikut adalah beberapa permasalahan yang ditemukan saat menjalankan program kegiatan CSR PT BNI:

- **Permasalahan terjadi pada bagian internal perusahaan yaitu keterlambatan pelaporan**

Hal ini terjadi karena adanya salah seorang pegawai bank diduga melakukan kasus korupsi yang mengakibatkan bank terlambat dalam melaporkan pelaporan pejabat eksekutif dan terlambat dalam melaporkan Sistem Informasi Debitur. Hal ini mengakibatkan bank terkena denda yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu berturut – turut sebesar Rp 682 Juta dan Rp 200 Ribu. BNI diharapkan bisa menyelesaikan kasus ini supaya tidak terulang lagi untuk kedepannya.

- **Adanya kredit bermasalah**

Kredit bermasalah merupakan masalah yang selalu ada di setiap lembaga keuangan yang melakanakan usahanya. Bank BNI pun demikian merasakan masalah ini dalam melakukan kegiatan CSR – nya. Kredit bermasalah ini diakibatkan karena ada beberapa nasabah yang tidak mampu membayar lunas kreditnya pada waktu yang telah ditentukan, termasuk juga kredit yang tidak

terbayarkan. Kredit bermasalah ini dapat menimbulkan kerugian yang berarti bagi BNI. Faktor penyebab timbulnya kredit ini karena adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari nasabah, pengurus atau pegawai bank, dan juga lemahnya sistem pengawasan dan sistem informasi kredit.

- ***Online Customer Complaint***

Bank BNI mengalami kendala dalam menghadapi komplain dari para nasabahnya. Ada beberapa nasabah yang memang mengalami terhadap produk yang ditawarkan bank BNI. Apabila komplain dari nasabah ini tidak diselesaikan dengan baik oleh pihak BNI maka akan menjadi perselisihan atau bahkan sengketa yang dapat merugikan bank dan nasabahnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi komplain dari para nasabah maka akan sangat diperlukan pengelolaan dan penanganan komplain yang baik.

- ***Reward and Punishment pada pegawai***

Reward dan *Punishment* adalah suatu bentuk dari sistem pengendalian manajemen yang mana berfungsi untuk memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya demi tujuan perusahaan tercapai.

BNI sendiri memakai sistem ini untuk membentuk pegawainya menjadi pegawai yang tingkat kinerja dan produktivitasnya tinggi. Sistem ini juga

digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam internal perusahaan

- **Permasalahan pada bantuan sarana dan prasarana umum**

BNI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal itu, BNI member bantuan sarana dan prasarana umum untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Namun ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu pada Kampoeng BNI. Ada beberapa Kampoeng BNI yang tidak menggunakan sarana dan prasarana ini dengan benar pada tahun 2015. Maka dari itu, Bank BNI langsung melakukan tindakan guna menangani masalah tersebut.

Beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan CSR PT BNI sudah dipaparkan diatas. Berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR PT BNI:

- **Solusi terhadap permasalahan keterlambatan pelaporan dan kasus dugaan korupsi**

PT BNI telah membayar sejumlah denda akibat adanya kasus ini. Permasalahan ini timbul akibat kurangnya pengawasan terhadap pegawai. Maka dari itu perlunya sanksi yang tegas untuk pegawai yang telah melakukan korupsi. Untuk pegawai yang tersangkut kasus korupsi maka perlu diambil langkah hukum untuk memproses kasus korupsi tersebut. Lalu juga meningkatkan sistem pengendalian manajemen seperti contohnya *reward and*

punishment. Hal ini sangat berguna untuk memotivasi pegawai dan juga mencegah kasus korupsi.

Lalu untuk keterlambatan pelaporan, solusi yang dapat diberikan adalah harus adanya bagian pengawasan terhadap keuangan dan pelaporan contohnya *supervisor*, hal ini diperlukan untuk menimalisir adanya kecurangan dan kemalasan dari pegawai itu sendiri.

- **Solusi terhadap adanya kredit bermasalah**

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah yaitu:

- Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas *rescheduling* hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain, usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baik

Dalam proses *rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga di jumlahkan (dikapitalisasi) untuk kemudian di jadwalkan kembali pembayaran untuk di buat perjanjian *rescheduling* tersendiri

- Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan

persyaratan lainya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.

Dalam *reconditioning* ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.

- Penataan kembali (*restructuring*)

Adalah perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Penyelesaian kredit bermasalah bisa juga melalui lembaga hukum.

Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

- **Solusi terhadap komplain nasabah**

Ada berbagai solusi yang dapat diberikan untuk menangani masalah komplain yaitu:

- Memohon maaf/empati
- Tetapkan apa yang nasabah inginkan untuk dilakukan penyelesaian
- Jagalah tetap loyal (jangan menghindar atau menyangkal)
- Usahakan membantu, bukan menyalahkan
- Berhati-hati jika tidak setuju dengan pendapat nasabah
- Jangan menyindir atau meremehkan
- Jangan abaikan keluhannya
- Minta persetujuan nasabah
- Bila perlu, informasikan pada atasan
- Jangan merendahkan reputasi bank
- Catat dan klasifikasikan komplain sebagai pelajaran bagi perusahaan
- Melakukan langkah konkrit untuk secepatnya menangani komplain
- Mengucapkan terimakasih

Saat nasabah komplain, pegawai bank haruslah dapat menahan emosi diri dan diperlukan tindakan professional dari pegawai seperti sikap, perilaku, pola bicara, dan gerakan tubuh yang dikiranya dapat menyenangkan hati nasabah yang melakukan komplain.

- **Solusi terhadap *reward and punishment*(hak pegawai)**

PT BNI disini sebagai pihak yang memimpin karyawannya untuk selalu bertindak sebagaimana yang diinginkan guna mencapai tujuan perusahaan.

Namun ada beberapa hal yang harus dipahami BNI untuk mengatasi masalah hak pegawai disini yang cenderung menyusahkan, yaitu:

- **Memberikan hak-hak karyawan dengan baik**

Karyawan direkrut untuk bekerja. Akan tetapi, kewajiban tersebut harus seimbang dengan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut antara lain:

- Gaji
- Tunjangan kesehatan
- Pelatihan
- Fasilitas kerja
- Kesejahteraan keluarga
- Jaminan sosial tenaga kerja
- Keamanan
- Tunjangan hari raya

Hak-hak tersebut tentunya harus diberikan secara profesional agar karyawan tidak pindah kerja. Jika hak-haknya sudah diberikan, karyawan akan fokus kepada kewajibannya saja tanpa direpotkan memikirkan hal-hal lain yang mengganggu. Dengan kata lain, mereka tenang bekerja untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan perusahaan.

➤ Menerapkan penilaian kinerja yang efektif

Cara lain untuk meningkatkan loyalitas karyawan adalah menerapkan penilaian kinerja yang efektif. Penilaian seperti ini dilakukan secara *fair* dan objektif. *Fair* berarti menilai berdasarkan standar yang telah disepakati, sedangkan objektif berarti menilai berdasarkan pencapaian kinerja, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

Jika kinerja mereka dinilai secara efektif, karyawan akan senang karena jerih payah mereka dihargai dengan baik. Dengan demikian, mereka umumnya betah bekerja.

➤ Menerapkan jenjang karier yang jelas

Selain hak karyawan dan penilaian kinerja yang efektif, menerapkan jenjang karier yang jelas dapat juga meningkatkan kesetiaan karyawan pada perusahaan. Jenjang karier yang jelas ini akan meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan baik sehingga dia bisa meraih puncak kariernya.

➤ Mempromosikan karyawan

Mempromosikan karyawan merupakan cara lain dalam meningkatkan kesetiaan karyawan pada perusahaan. Promosi ini diharapkan membuat karyawan bersangkutan merasa tertantang dengan jabatan barunya sehingga mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tanpa memikirkan untuk pindah ke perusahaan lain. Selain itu, promosi ini memberikan tambahan finansial bagi karyawan bersangkutan.

➤ Memberikan bonus

Cara terakhir untuk meningkatkan loyalitas karyawan adalah memberikan bonus. Ini bisa berupa bonus kinerja (*performance bonus*), bonus akhir tahun (*year-end bonus*), atau bonus pembagian keuntungan (*profit-sharing bonus*)

• **Solusi terhadap bantuan sarana dan prasarana umum**

Permasalahan ini diakibatkan oleh beberapa anggota masyarakat yang kurang berperan aktif dalam program CSR Kampoeng BNI. BNI telah mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kampoeng BNI yang terkait. Dengan diberikannya bantuan sarana dan prasarana maka diharapkan akan menjadi Kampoeng yang bermanfaat bagi Negara, namun ternyata tidak. Ada beberapa penyelewengan fungsi sarana dan prasarana sehingga BNI akhirnya menindak kasus ini.

Solusi yang dapat diberikan adalah melakukan program revitalisasi pada Kampoeng BNI yang sudah ada untuk dibentuk ulang kembali guna mengefektivitaskan kegiatan produksi baik pertanian, kerajinan tangan, kelautan, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih berfokus pada bidang yang dirasa dapat menimbulkan benefit yang lebih terasa bagi BNI, masyarakat, Negara, dan juga lingkungan.

4.12 Evaluasi terhadap Implementasi CSR PT BNI Tbk dari Tahun 2010 - 2015

Hadi (2011) menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan: 1) memperoleh masukan

guna perencanaan program kegiatan, 2) memperoleh berbagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan layak atau tidak layaknyaprogram CSR dilanjutkan, 3) memperoleh masukan perbaikan program, 4) memperoleh masukan tentang hambatan program yang sedang dilaksanakan, 5) memperoleh masukan untuk perbaikan, dan 6) memperoleh rekomendasi dan pelaporan terhadap penyandang dana.

Sebagai perusahaan BUMN, BNI adalah salah satu perusahaan yang memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam SRA (*Sustainability Reporting Award*), yang mana merupakan kontes penghargaan terbesar di Indonesia untuk perusahaan yang menjalankan CSR – nya dengan baik. PT BNI selalu dan senantiasa melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala. Tahap evaluasi dan pelaporan sendiri merupakan kegiatan wajib yang dilakukan BNI dalam jangka waktu tertentu dimana untuk memperoleh temuan sejauh mana efektivitas penerapan CSR, kendala yang ditemukan, dan memperoleh kritik dan saran untuk memperbaiki program CSR.

Evaluasi program CSR PT BNI dilakukukan oleh tim yang sudah dibentuk oleh dewan komisioner BNI yang terdiri dari *supervisor*, bagian humas, dan bagian akuntansi dan keuangan. Lalu juga diperkuat oleh lembar tanggapan atas laporan keberlanjutan BNI yang digunakan nantinya oleh para *stakeholders* untuk member masukan guna meningkatkan dan menyempurnakan kinerja keberlanjutan BNI.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan penilaian yang dapat dilakukan oleh *stakeholders* yaitu:

Tabel 4.8 Penilaian atas keberlanjutan BNI

No.	Area	Penilaian
1	Informasi yang disajikan dalam Laporan ini telah sesuai dengan harapan Anda.	
2	Data yang disajikan telah transparan, dapat dipercaya dan berimbang	
3	Laporan ini dapat dibaca dengan nyaman, gaya bahasa yang sesuai serta jelas	
4	Layout, tata warna, tampilan dan gambar dalam laporan ini menarik	
5	Informasi yang anda inginkan untuk diperdalam adalah	
6	Saran lain yang anda ingin sampaikan terhadap Laporan Keberlanjutan BNI	

Sumber: Laporan Keberlanjutan BNI Tbk

PT BNI Tbk menggunakan indikator dan standard yang berdasarkan kepada GRI (*Global Reporting Initiative*) yang telah menjadi dasar dari banyak perusahaan di seluruh dunia. Standard ini terus berubah dari tahun ke tahun, dan BNI terus merubah laporan keberlanjutannya sesuai dengan standard ini. Untuk tahun 2010 dan 2011, BNI menggunakan GRI G3, Untuk tahun 2012, BNI menggunakan G3.1, dan Untuk tahun 2013, 2014, 2015 BNI menggunakan G4. Disini hanya akan dibahas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

GRI ini dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: *general standard disclosures*, kategori ekonomi, kategori lingkungan, kategori sosial, dan indikator khusus sektor layanan keuangan. Dalam setiap kategori tersebut, ada beberapa indikator yang akan mengukur seberapa baik laporan keberlanjutan dari BNI sebagai penilaian atas usaha dalam mendukung keberlanjutan Negara Indonesia.

Dari kategori *general standard disclosures*, akan dapat dinilai aspek material dari segi strategi dan analisis, profil organisasi, aspek material dan *boundary*, profil laporan, Indeks GRI konten, *Assurance*, tata kelola, dan etika dan integritas, lalu, dari kategori ekonomi, berisikan aspek kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung, lalu dari kategori lingkungan, berisikan aspek material, energy, dan *biodiversity*. Dari kategori sosial, berisikan aspek pekerjaan, pelatihan, dan pendidikan, kesehatan dan keselamatan kerja, diskriminasi, Hak asasi manusia, anti korupsi, dan kepatuhan. Lalu untuk indikator khusus sektor layanan keuangan berisikan produk portofolio, masyarakat setempat, dan tanggung jawab produk.

Jumlah *item* yang harus dilaporkan dalam standard G3 adalah 79 *item* ; lalu untuk standard G3.1 adalah 84 *item*. Dan untuk standard G4 adalah 91 *item*. Terjadi peningkatan pada standard GRI yang berarti perusahaan dituntut untuk menjadi lebih baik lagi. Dari tahun 2010 hingga tahun 2015, terjadi peningkatan dan juga penurunan dalam rangka pemenuhan standar GRI oleh BNI yang dapat dilihat pada **tabel 4.9**. Hal ini membuktikan bahwa program yang telah dilaksanakan BNI dalam melakukan CSR dapat dinilai baik namun ada penurunan angka pelaporan di tahun 2013 dan 2015.

Tabel 4.9 Jumlah *item sustainability reporting* PT BNI

Tahun	Standard yang digunakan	Jumlah item yang harus dilaporkan	Item yang sudah dilaporkan
2013	G4	91	74
2014	G4	91	84
2015	G4	91	67

Sumber: Data yang diolah

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa BNI telah melakukan dan melaporkan program CSR – nya. Ternyata BNI mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2013 dan 2015. Hal tersebut menjadi tanda tanya apakah yang terjadi pada BNI di tahun 2013 dan 2015. Untuk penilaian sementara, BNI telah cukup baik dalam melaporkan CSR – nya.

Dalam GRI *guidelines* terdapat beberapa penilaian yang dapat diberikan kepada perusahaan yang menjalankan program CSR, yaitu A, B, dan C. Perusahaan dapat mendapatkan nilai plus (+) bila menggunakan jasa penilai audit dari luar (eksternal).

BNI menggunakan Jasa Penilai dari luar yaitu NCSR (*National Center for Sustainability Reporting*) dimana yang menyatakan bahwa NCSR telah melakukan pengecekan sesuai GRI atas Laporan Keberlanjutan PT BNI. Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kriteria GRI telah diterapkan dalam laporan keberlanjutan.

Berikut adalah tabel yang berisikan rata – rata pengungkapan Indikator CSR pada PT BNI Tbk, yaitu:

Tabel 4.10 Rata – Rata pengungkapan indikator CSR PT BNI

Indikator	Tahun		
	2013	2014	2015
Ekonomi	77 %	88 %	88 %
Sosial	29 %	100 %	78 %
Lingkungan	60 %	41 %	23 %
Rata - rata	81 %	92 %	73 %

Sumber: Data yang diolah

Untuk tahun 2013, hanya dilaporkan sejumlah 74 dari 91 item yang wajib dilaporkan dengan rata – rata sebesar 81 % yang masih berada dalam rentang nilai A. Lalu untuk tahun 2014, 84 *item* dari 91 *item* telah dilaporkan sehingga masih mendapat nilai A. Dan untuk tahun 2015, hanya 67 *item* dari 91 *item* yang harusnya dilaporkan dan mendapat rata rata 73 % yang berarti mendapat nilai B.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama adalah mengenai pengimplementasian CSR oleh PT BNI Tbk, dimana BNI membagi kegiatan CSR – nya menjadi tiga bagian yaitu: BNI – Menuju kemajuan sumber daya manusia; BNI – Mencapai Profitabilitas; BNI – Menjaga kelestarian alam. BNI sendiri memiliki struktur bisnis yang baik, dimana BNI terus melakukan pembangunan ke segala arah dan pelaksanaan CSR yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. BNI terus mengimplementasikan CSR – nya dengan sangat baik dimana salah satunya pada Kampong BNI. Kampong BNI mendidik masyarakat untuk lebih mandiri dan fokus pada bidang keahlian di desa mereka untuk menambah profit. Hingga tahun 2015 terdapat 21 Kampong BNI yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga dalam bidang lingkungan, BNI banyak sekali melakukan kegiatan yang mendukung keberlangsungan perusahaan di masa depan terkait penyelamatan lingkungan. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan BNI dalam rangka penyelamatan lingkungan salah satunya adalah penghematan kertas dan penanaman 1.000.000 pohon hijau. Maka dari itu, Implementasi CSR yang dilakukan oleh BNI sudah berjalan dengan sangat baik.

Kedua, adalah mengenai kebijakan dan program yang dilakukan oleh BNI. Kebijakan yang dilakukan oleh BNI berwujud PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang dimana memberikan bantuan dana dan barang dalam berbagai

bidang, contohnya: bidang pendidikan dan bidang pelestarian lingkungan. Lalu kebijakan lainnya yang dianut oleh BNI ada tiga, yaitu

1. *Sinergi Business Banking*, menciptakan hubungan dengan mitra bisnis yang menghasilkan hubungan mutualisme, berarti menguntungkan kedua pihak
2. *Consumer and Retail*, salah satu sektor industri yang ditargetkan BNI karena semakin pesatnya globalisasi yang membuat hal ini menjadi penting bagi keberlangsungan perusahaan.
3. *Subsidiary corporate* untuk mengoptimalkan keuntungan melalui pendekatan *value chain*, bertujuan untuk memaksimalkan profit perusahaan dengan cara membagi perusahaannya menjadi beberapa anak perusahaan yang fokus pada bidang tertentu, seperti syariah dan pembiayaan.

Ketiga, adalah mengenai masalah yang dihadapi selama pelaksanaan CSR. BNI memiliki kendala dalam menjalankan CSR – nya contohnya dalam bidang sarana dan prasarana umum dimana masyarakat kurang mandiri dan kurang benardakam menggunakan sarana dan prasarana yang telah diberikan BNI, sehingga pemecahannya BNI memfokuskan menjadi beberapa bidang yang benar – benar dirasa penting dan masyarakatnya dapat bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh BNI.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut, yaitu:

1. BNI sebagai perusahaan BUMN, diharapkan selalu meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi, ini semua guna menjadi perusahaan di bidang keuangan yang terdepan dalam melakukan kepedulian pada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat.
2. Sebaiknya BNI meningkatkan standar pengungkapannya dari tahun ke tahun. Ada beberapa tahun yang terlihat menurun kinerjanya dalam pelaksanaan CSR. Hal ini demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lagi dan juga menambah nilai lebih perusahaan dalam hal citra perusahaan.
3. PT BNI sebaiknya lebih meningkatkan dan memperluas kegitas CSR – nya terutama pada desa – desa tertinggal yang butuh bantuan pelatihan dan dana segar untuk menjadikan desa tersebut mandiri dan dapat menunjang devisa Negara.
4. Dalam pelaksanaan CSR - nya, BNI disarankan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala agar permasalahan yang sama tidak muncul kembali. Ini semua demi citra perusahaan yang lebih baik lagi.

5. Apabila dirasa bermanfaat, penulis berharap untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai penerapan CSR perusahaan di Indonesia.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keterbatasan penelitian yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitiannya, antara lain:

1. Keterbatasan pada jumlah sampel yang digunakan yaitu, hanya 1 perusahaan saja yaitu PT BNI. Apabila dirasa memungkinkan, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah sampel perusahaan untuk digunakan untuk dibandingkan. Ini semua demi mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
2. Keterbatasan pada data yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan enam tahun laporan keberlanjutan BNI yaitu dari tahun 2010 – 2015. Apabila dirasa memungkinkan, peneliti berharap di penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah tahun penelitian, sehingga hasil penelitian yang didapatkan bisa lebih baik lagi.
3. Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif, yang dimana berarti hasil dari penelitian ini masih bersifat subjektif walaupun sudah dilengkapi teori – teori yang mendukung penelitian. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode kuantitatif, sehingga hasil yang diharapkan dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Taufik. 2008. *Telaah Kritis Implementasi CSR PT Perkebunan Nusantara X dalam Pemberdayaan Petani Tebu*. Skripsi FEB Universitas Brawijaya
- Anselm, Strauss dan Juliat Corbin. 2003. *Dasar – dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arief Suadi, et.al, 1988. *Akuntansi Sosial: Implikasi dan Kemungkinan Pengembangan di Indonesia*, majalah akuntansi, no. 11 bulan Nopember.
- Ascarya M, Adrid. 2007. *Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT Telkom Tbk*. Skripsi FEB Universitas Brawijaya.
- Bank Negara Indonesia. (2013-2015). *Laporan Keberlanjutan*. Jakarta: BNI.
- Branco. Rodriguez. 2007. *Corporate Social Responsibility and resource based perspective*, *Jounal of Business Ethics*. Vol 69 hal 111.
- Carroll, A.B. 1991. *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*. *Business Horizons*.
- Cowen, S.S., Ferreri, dan Parker, L.D. 1986. *The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure, Accounting, Organizations and Society*
- Dwi Setio, Cahyo. 2007. *Implementasi Strategi CSR pada Pertamina Refinery Unit VI Balongan Indramayu*. Skripsi FEB Universitas Brawijaya.
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with forks: The Triple Bottom Lines of 21st Century Business*. Capstone: Oxford
- Faladia M, Arief. 2009. *Implementasi Strategi CSR pada PT Petrokimia Gresik*. Skripsi FEB Universitas Brawijaya.

Hadibroto dan Subibyo, Bambang. 1988. *Studi tentang Laporan Berkelanjutan*.

Heblich, Falck. 2007. *Corporate Social Responsibility: Doing Well By Doing Good*. Business horizons, Hal 247.

Hidayat Syah. 2010. *Penelitian Deskriptif*. Jakarta: Rajawali.

Hurairah.Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora

Islami Susanti, Komang. 2010. *Implementasi dan Pelaporan CSR (Studi kasus pada PT PLN Jawa Timur)*. Skripsi FEB Universitas Brawijaya.

ISO 26000 Tahun 2007 diakses melalui www.iso.org pada tanggal 5 Juni 2016

Keputusan Menteri BUMN No. SF/433 Tahun 2003

Kotler. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Erlangga.

M, Suhandri. 2007. *Skema CSR*. Kompas 4 Agustus 2007.

McMillan, J.H., dan Schumacher, S. 2003. *Research in Education: A Conceptual introduction (5th ed)*. New York: Longman.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mulyadi. 2003. *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutan*. Materi seminar.PSKK. Yogyakarta

Nor, Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.

Rakhmat, Agung. 2008. *Good Corporate Governane Sebagai Prinsip Implementasi CSR (Studi Kasus di PT TELKOM)*. Skripsi FEB Universitas Brawijaya.

Ramanathan. 1979. *Toward A Theory of Corporate Social Accounting*, Hal 519.

Soewarno, Noorlailie. 2009. *Corporate Social Responsibility*, Majalah Ekonomi. No. 1 April.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Tiara Shilda, Gadissa. 2007. *Perbandingan Laporan Keberlanjutan anata Telkom dan Indosat*. Skripsi FEB Universitas Brawijaya

Undang – Undang No.40 Tahun 2007 pasal 74

Undang – Undang No.19 Tahun 2007 tentang BUMN

Undang – Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 15 dan 34

Waryanto. 2010. *Pengaruh Karakteristik Good Governance terhadap Luas Pengungkapan CSR*. Skripsi FEB UNDIP Semarang

Wibisono.2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya: Media Grapika

www.bni.co.id diakses pada tanggal 5 Juni 2016

www.globalreporting.org diakses pada tanggal 5 Juni 2016